RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025 - 2029

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan pedoman strategis lima tahunan bagi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya guna mendukung pembangunan daerah khususnya bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.

Rencana Strategis (Renstra) ini disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang mengatur mekanisme, tahapan, dan substansi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah agar selaras dan sinergis dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029, merupakan dokumen perencanaan yang tidak terlepas dari dokumen perencanaan pada tingkat Kabupaten berupa RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis ini digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan urusan penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang hendak dicapai pada periode 2025—2029. Renstra ini merupakan dasar serta pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta penyusunan Rencana/Program Pembangunan urusan penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan lainnya.

Semoga semua program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam lima tahun kedepan dapat lebih terarah, berdaya guna, dan berhasil guna.

Barabai, 19 September 2025
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

MUHIDDIN, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680504 199703 1 008

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
DAFTAR TABEL		iv
DAFTAR GAMBAR		v
BAB I	**PENDAHULUAN**	I-1
	1.1 Latar Belakang	I-1
	1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-4
	1.3 Maksud dan Tujuan	I-6
	1.4 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II	**GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**	II-1
	2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumberdaya Perangkat daerah; Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah; dan kelompok sasaran layanan	II-1
	2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan isu strategis	II-22
BAB III	**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**	III-1
	3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	III-1
	3.2 Strategi	III-7
	3.3 Arah Kebijakan	III-7
BAB IV	**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**	IV-1
	4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-1
	4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	IV-125
BAB V	**PENUTUP**	V-1
	5.1 Kaidah Pelaksanaan	V-1
	5.2 Pedoman Transisi	V-2

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel	2.1.1	Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025	II-3
Tabel	2.1.2	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Di Lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025	II-3
Tabel	2.1.3	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025	II-4
Tabel	2.1.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan Tahun 2025	II-4
Tabel	2.1.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2025	II-6
Tabel	2.1.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 – 2024	II-10
Tabel	2.1.7	Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2024 dengan Target akhir jangka menengah Renstra Tahun 2021 - 2025	II-18
Tabel	2.1.8	Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Tahun 2025	II-19
Tabel	2.1.9	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Tahun 2024	II-19
Tabel	2.1.10	Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan Tahun 2021 - 2024	II-20
Tabel	2.1.11	Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 – 2024	II-20
Tabel	2.1.12	Masalah Strategis, Masalah dan Akar Masalah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	II-24
Tabel	2.1.13	Pelayanan Perumusan Isu Strategis Badan Perncanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	II-31
Tabel	3.1.1	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	III-2
Tabel	3.1.2	Tujuan, Sasaran dan Indikator	III-3
Tabel	3.1.3	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah	III-5
Tabel	3.3.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah	III-09
Tabel	3.3.2	Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah	III-11

Tabel	3.3.3	Pentahapan Renstra Bappelitbangda Kabupaaten Hulu Sungai Tengah	III-11
Tabel	4.1.1	Sasaran dan Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	IV-5
Tabel	4.1.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, dan Pendanaan Indikatif	IV-36
Tabel	4.1.3	Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-117
Tabel	4.2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	IV-126
Tabel	4.2.2	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah	IV-126

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar	1.1	Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra	I-3
Gambar	1.2	Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Daerah maupun Perencanaan Pusat	I-3
Gambar	2.1	Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai tengah	II-2

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan atau prioritas dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Conyers dan Hills (1994) mendefinisikan **"**perencanaan (Planning)" sebagai suatu proses yang berkesinambungan, mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya (resources) untuk mencapai tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Sumber daya yang dimaksudkan meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, Sumber Daya Modal dan Keuangan. Dalam pembangunan ekonomi, Hatta menyebutkan bahwa alasan utama diperlukannya Perencanaan adalah karena sumber daya yang tersedia untuk membangun masyarakat terbatas jumlahnya sementara kebutuhannya sangat besar dan sangat beragam.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang terfokus, komprehensif dan dirancang secara konseptual, analitis, realistis serta diwujudkan dalam suatu kebijakan-kebijakan dan berbagai program, sehingga menghasilkan Rencana Strategis. Pada saat sekarang proses perencanaan sudah mengalami pergeseran paradigma, dimana *proses perencanaan dituntut untuk mampu menserasikan program-program pembangunan dan keseimbangan baru antara proses Top Down dan Bottom-Up dalam rencana pembangunan* sebagai upaya meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan dengan pemerintah atasan.

Sehubungan dengan konteks tersebut diatas, Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) harus mampu mengantisipasi dan mengimplementasikan system dan mekanisme dalam menampung, menganalisis dan menggunakan kekuataan (strenghts) sumber daya untuk mengatasi kelemahan (weakness) menjadi peluang (opportunities), sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang akurat. Sejak bergulirnya Otonomi Daerah, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Intsruksi Presiden tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, secara tidak langsung berpengaruh terhadap penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) adalah sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian

rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap perangkat daerah perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap perangkat daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra perangkat daerah disusun sesuai dengan urusan pemerintahan daerah yang diemban, tugas dan fungsi serta berpedoman kepada RPJM Daerah yang bersifat indikatif.

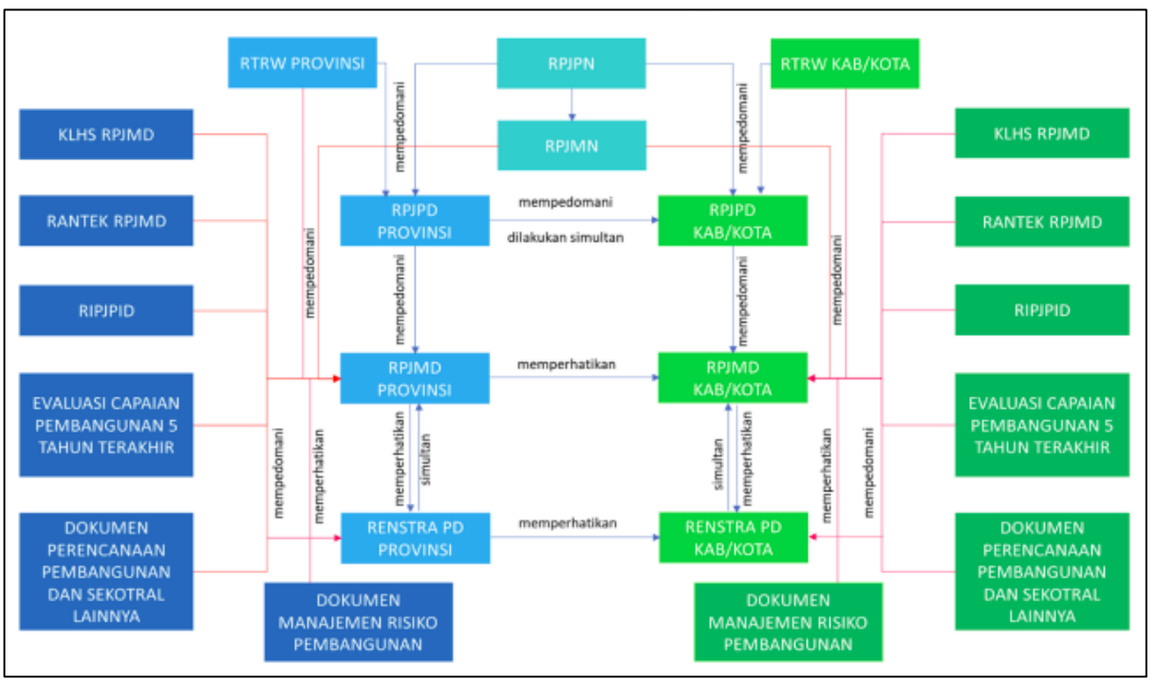
Bappelitbangda sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian pengembangan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam urusan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan di daerah. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda tersebut diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Bappelitbangda tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Renstra merupakan komitmen Bappelitbangda yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Hulu Sungai Tengah yaitu "TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT".

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah disusun mengacu pada dokumen RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 - 2029, juga mempertimbangkan sejumlah dokumen yang terkait, seperti tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Renstra Kementerian PPN/Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, dan sejumlah dokumen terkait lainnya. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan tahunan. Bagan alir tahapan dan tatacara penyusunan Renstra dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan Renstra

Bagan alur perencanaan dan penganggaran dan keterkaitan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.2. Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan Daerah maupun Perencanaan Pusat

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679undang);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang no 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
11. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 96, TLN 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
29. Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 5 tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan;
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No. 6 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 No 6);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025- 2029 (Lembaran Daerah Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 13 Tahun 2016 tentang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 – 2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2016 Nomor 13).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045;
37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 Nomor 2);
38. Peraturan Bupati No 56 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan rencana strategis ini adalah sebagai arah dan pedoman bagi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun sesuai RPJMD.

Tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah :

1. Mengoptimalkan peran Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Bappelitbangda.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
- 2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; Sumberdaya Perangkat daerah; Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah; dan kelompok sasaran layanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah yang memuat permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan isu strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 3.1 Tujuan dan Sasaran
- 3.2 Strategi
- 3.3 Arah kebijakan

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- 4.1 Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
- 4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB V PENUTUP
- 5.1 Kaidah Pelaksanaan
- 5.2. Pedoman Transisi

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah yang memuat Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumberdaya Perangkat daerah, Kinerja Pelayanan Prangkat Daerah, dan kelompok sasaran layanan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, fungsi adalah melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) melaksanakan urusan penunjang pemerintahan yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan penelitian serta pengembangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai fungsi yaitu :

a) Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
b) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

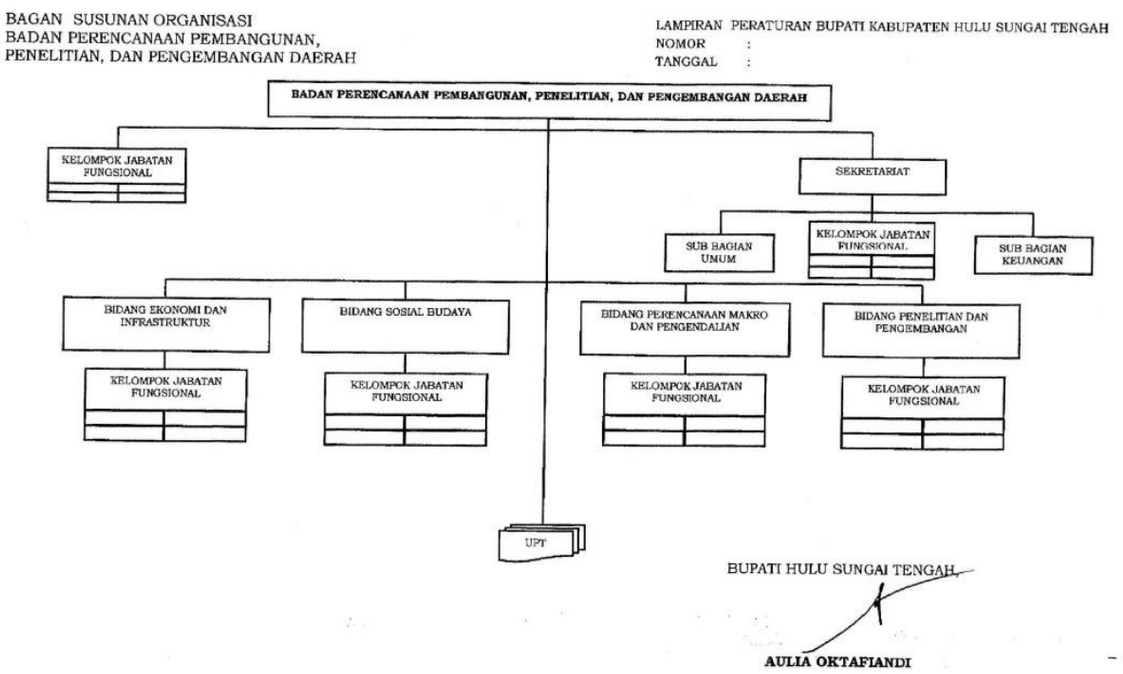
Berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri dari 1 (satu) orang Kepala yang membawahi 1 (satu) orang Sekretaris dengan 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian, 4 (empat) orang Kepala Bidang yang membawahi 8 (delapan) Jabatan Fungsional yaitu :

a. Kepala
b. Sekretariat, membawahkan:
    1. Subbagian Umum;
    2. Subbagian Keuangan.
c. Bidang Sosial dan Budaya, membawahkan:
    1. JF Perencana Ahli Pertama;
    2. JF Perencana Ahli Muda.
d. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur, membawahkan:
    1. JF Perencana Ahli Pertama;
    2. JF Perencana Ahli Muda.
e. Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian, membawahkan:

1. JF Perencana Ahli Pertama;
2. JF Perencana Ahli Muda.

f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
1. JF Perencana Ahli Pertama;
2. JF Perencana Ahli Muda.

g. Kelompok Jabatan Fungsional



Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah

A. Sumberdaya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki mempengaruhi kapasitas pelayanan organisasi. Komposisi jabatan dalam struktur organisasi Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan peraturan daerah tersebut di atas adalah: 1 (satu) orang Eselon II; 5 (lima) orang Eselon III terdiri dari 1 (satu) orang sekretaris dan 4 (empat) orang kepala bidang yang definitif (terisi) dan 2 orang Eselon IV sebagai kasubag dan 4 (empat) orang Jabatan Fungsional serta 6 (enam) orang Fungsional Umum serta 2 (dua) orang tenaga PPPK. Sumber daya manusia di Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah berjumlah 20 (dua puluh) orang.

Komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 13 orang laki-laki (65 %) dan 7 orang perempuan (35 %) seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.1.1
Rekapitulasi Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025

No	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Kepala	1	-	1
2.	Sekretariat	3	4	7
3.	Bidang Perencanaan Makro dan Pengendalian	1	1	2
4.	Bidang Ekonomi dan Infrastruktur	3	0	3
5.	Bidang Sosial dan Budaya	2	1	3
6.	Bidang Penelitian dan Pengembangan	3	1	4
JUMLAH TOTAL		13	7	20

Komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan golongan terdiri dari 4 orang golongan IV (20 %), 14 orang golongan III (70 %), 2 orang golongan II (10 %) seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.2.
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan Di Lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025

No	UNIT KERJA	JUMLAH PNS	GOLONGAN																				
			IV						III					II					I				
			A	B	C	D	E	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML	A	B	C	D	JML
1.	KEPALA BAPPELITBANGDA	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	SEKRETARIAT	7	-	1	-	-	-	1	3	1	-	1	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
3.	BIDANG SOSIAL BUDAYA	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	BIDANG EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	BIDANG PERENCANAAN MAKRO DAN PENGENDALIAN	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	BIDANG LITBANG	4	1	-	-	-	-	1	2	-	-		2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
JUMLAH TOTAL		20	2	1	1	-	-	4	7	2	-	5	14	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-

Komposisi pegawai Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari 1 orang S2 (5 %), 14 orang S1 (70 %), 4 orang D3 (20 %) dan 1 orang SLTA (5 %).

Tabel 2.1.3
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Di Lingkungan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025

No	Unit Kerja	Pendidikan								Jumlah	
		S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Laki-laki	Perempuan
1	KEPALA BAPPELITBANGDA	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
2	SEKRETARIAT	-	1	3	2	-	1	-	-	4	3
3	BID. SOSIAL BUDAYA	-	-	3	-	-	-	-	-	2	1
4	BID. EKONOMI DAN INFRASTRUKTUR	-	-	2	1	-	-	-	-	3	-
5	BID. PERENCANAAN MAKRO DAN PENGENDALIAN	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1
6	BID. DATA & LITBANG	-	-	3	1	-	-	-	-	3	1
	JUMLAH	-	1	14	4	-	1	-	-	14	6

Sumberdaya perangkat daerah lainnya adalah berupa perlengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yang dibutuhkan oleh Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efisien dan efektif. Sarana dan prasarana yang tersedia adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah sampai dengan tahun 2025

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi	Ket.
1.	Bangunan Kantor	1 buah	Baik	
2.	Kendaraan Roda 4	3 buah	Baik	
3.	Kendaraan Roda 2	17 buah	Baik	
4.	Komputer	12 buah	Baik	
5.	Laptop	19 buah	Baik	
6.	Printer	8 buah	Baik	
7.	Proyektor	3 buah	Baik	
8.	Lemari arsip	9 buah	Baik	
9	Videotron	1 buah	Baik	

B. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bappelitbangda sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati Hulu Sungai Tengah dalam urusan penunjang pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian pengembangan maka pelayanan yang diberikan adalah berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dan litbang serta hal-hal pendukungnya. Kinerja pelayanan tersebut dapat dilihat pada dengan menggunakan

indikator-indikator kinerja, khususnya terkait dengan indikator tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2021 - 2026.

Untuk lebih jelasnya capaian kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan realisasinya dari tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada tabel II.5.

Tabel 2.1.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2024

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	**Persentase Capaian Target RPJMD**					76%	**10%**	**20%**	**40%**	**60%**	**80%**	**8,70%**	**19,30%**	**38,9%**	**58,70%**	**87,0**	**96,5**	**97,3**	**97,8**
2.	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD					96%	95%	95%	95%	95%	95%	87%	112%	97,78%	93,03%	91,6	117,9	102,9	97,9
3.	Persentase rata-rata capaian target IKU Renja PD						85%	88%	90%	95%	95%	81%	99%	88,06%	96,09%	95,0	112,2	97,8	101,1
4.	Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD					97,00%	98%	98%	99%	99%	99%	100%	99,99%	99,00%	99,62%	102,0	102,0	100,0	100,6
5.	Indeks Perencanaan						95%	95%	95%	95%	95%	99%	99,99%	100%	96,75%	104,2	105,3	105,3	101,8
	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP						22,50	22,90	23,50	24,00	24,50	22,5	22,35	22,53	22,64	100,0	97,6	95,9	94,3
	Indeks Inovasi Daerah						**14**	**19**	**23**	**27**	**32**	**32**	**36**	**11,10**	**41,70**	**228,6**	**189,5**	**48,3**	**154,4**
	Persentase hasil kelitbangan yang diberdayagunakan					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100 %	100%	100%	100%	100,0	100,0	100,0	100,0
	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						**32,12**	**32,75**	**33,5**	**34**	**34,5**	**34,5**	**35**	**29,6**		**107,4**	**106,9**	**88,4**	**0,0**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
	Nilai SAKIP Perangakat Daerah						82	84	86	88	90	90	93	77,98	83,95	109,8	110,7	90,7	95,4
	Persentase Penyerapan Anggaran						82%	83%	84%	85%	86%	81,80	73,44%	69,97%	79,47%	99,76	88,5	83,3	93,5

Dari 11 indikator kinerja yang diukur, maka ada 5 indikator yang sampai dengan tahun 2024 targetnya dapat dicapai yaitu:

1. Indeks Perencanaan dengan capaian pada tahun 2024 sebesar 101,8 %. Hal ini menggambarkan bahwa keselarasan antara RPJMD dengan RKPD sebagai perencanaan tahunannya maupun dengan perencanaan tahunan perangkat daerah serta keselarasan dengan dokumen penganggaran perangkat daerah (Rencana Kerja Anggaran / RKA-PD) baik dari aspek sasaran, prioritas pembangunan, program, kegiatan, sub kegiatan serta indkator yang digunakan sudah konsisten.
2. Persentase rata-rata capaian target IKU Renja PD yaitu dengan capaian 101,1 % pada tahun 2024. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pencapaian kinerja utama perangkat daerah dari target yang ditetapkan sudah tercapai.
3. Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD dengan capaian kinerja pada tahun 2024 sebesar 100,6 %. Sejak penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang sudah terintegrasi dari perencanaan dan penganggaran, maka konsistensi program, kegiatan dan sub kegiatan lebih mudah dijaga dari perencanaan sampai penganggaran. Program yang tidak ada di RPJMD tidak akan muncul di RKPD dan program dan kegiatan yang ada di penganggaran dan DPA SKPD hanya yang ada di RKPD. Hal ini menandakan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sudah berjalan baik.
4. Indeks Inovasi Daerah, realisasi kinerja pada tahun 2024 adalah mencapai 154,4 % . Target sampai dengan tahun 2024 sebesar 27, maka dapat dicapai sebesar 41,7 dan menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah masuk dalam kategori kabupaten inovatif dari sebelumnya masuk kabupaten tidak inovatif. Hal ini dilakukan dengan upaya mendorong seluruh perangkat daerah untuk berinovasi dan setiap awal bulan dilakukan peluncuran inovasi perangkat daerah oleh Bupati.
5. Persentase hasil kelitbangan yang diberdayakan dengan capaian kinerja sebesar 100 %. .Hal ini menandakan bahwa hasil-hasil kajian yang telah dilakukan telah dimanfaatkan untuk pembuatan kebijakan daerah.

Ada 6 indikator kinerja yang targetnya sampai dengan tahun 2024 masih belum tercapai adalah sebagai berikut :

1. Persentase capaian target RPJMD
   Capaian target RPJMD belum sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari tahun ke tahun capaian target RPJMD selalu berada di bawah target. Pada tahun 2024 sebagai tahun ke 4 pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 harusnya sudah tercapai sebesar 60 %, realisasinya baru sebesar 58,7 % atau 97,8 %. Hal ini disebabkan beberapa target indikator yang capaiannya rendah seperti indikator kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya bencana banjir bandang yang terjadi pada tahun 2021 serta bencana sosial pandemi covid 19 yang terjadi pada tahun 2020 - 2022 dengan terjadinya pembatasan kegiatan skala besar dan dilanjutkan dengan terjadinya fenomena la nina 3 tahun berturut-turut (triple dip la nina) dari tahun 2022-2024 menyebabkan angka kemiskinan sempat meningkat diluar proyeksi target RPJMD, dan perekonomian daerah sempat tumbuh negatif sehingga perlu *recovery* dan target jauh tidak tercapai.
2. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP.
   Indikator nilai perencanaan kinerja SAKIP, menggambarkan kualitas dokumen perencanaan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pada tahun 2024 capaian baru sebesar 22,64 atau

94,3 %. Nilai Perencanaan Kinerja dalam SAKIP yang ideal adalah 25. Hal ini dikarenakan masih ditemukan penggunaan indikator kinerja dalam perencanaan baik di RPJMD maupun Renstra PD belum SMART serta belum beorientasi *outcomes dan impact.* Selain itu penyusunan perencanaan penjenjangan kinerja juga belum menggunakan kerangka berfikir logis dan critical success factors (CSF) yang baik.

3. Rata – rata capaian IKU RKPD
   Realisasi indicator diatas sempat mengalami pencapaian target di Tahun 2022 dan Tahun 2023, tetapi di Tahun 2024 kembali mengalami penurunan yaitu dengan capaian 97,9 %. Hal ini selain karena indikator pertumbuhan ekonomi dan indikator terkait infrastruktur yang capaiannya cukup rendah. Pada indikator pertumbuhan ekonomi, capaian yang rendah ada pada indikator pertumbuhan sektor perdagangan, pariwisata dan ekonomi kreatif serta industri pengolahan dengan capaian antara 58 - 86 %. Pada indikator terkait infrastruktur, capaian yang rendah adalah pada indikator cakupan pembangunan infrastruktur dasar hanya tercapai 65,43 % dan indikator indeks infrastruktur wilayah yang hanya tercapai 63,33 %.
4. Indeks Reformasi Birokrasi PD. Realisasi indicator diatas sempat mencapai target pada Tahun 2021 dan Tahun 2022, namun pada Tahun 2023 tidak dilakukan lagi pengukuran untuk perangkat daerah sehingga tidak bisa dilakukan evaluasi lagi.
5. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, Capaian indikator di atas walaupun tidak mencapai target dari Tahun 2023 sd Tahun 2024, tetapi mengalami peningkatan dan pada tahun 2024 sudah mencapai 83,95. Masih perlunya perbaikan baik dari komponen perencanaan kinerja karena capaiannya baru 87 %, komponen pengukuran kinerja capaiannya 95 %, komponen pelaporan kinerja baru tercapai 79 %, komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebesar 70 %.
6. Persentase penyerapan anggaran. Realisasi indicator diatas walaupun tidak mencapai target dari Tahun 2023 sd Tahun 2024, tetapi mengalami peningkatan.
   Penyerapan anggaran masih cukup rendah karena ada beberapa efisiensi pengeluaran yang dilakukan serta ada beberapa yang tidak terlaksana karena terkendala waktu dengan padatnya jadwal kegiatan yang harus dilakukan.

Untuk melihat ketercapaian kinerja anggaran dan realisasinya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2021 - 2024

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 5.196.438.208	Rp 3.732.101.793	Rp 3.834.168.937	Rp 3.189.493.647	Rp 3.681.714.907	Rp 3.717.795.352	Rp 2.969.657.290	Rp 3.315.472.736	71%	100%	77%	104%	-14,09%	-2,50%
a	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Rp 44.900.000	Rp 53.677.000	Rp 43.369.150	Rp 38.749.045	Rp 10.315.680	Rp 26.181.400	Rp 40.788.625	Rp 38.069.000	23%	49%	94%	98%	-3,44%	67,64%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 24.200.000	Rp 12.704.000				Rp 5.442.800				43%			-73,75%	-100,00%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Rp 22.019.900	Rp 21.675.750	Rp 16.749.700		Rp 10.082.900	Rp 20.990.625	Rp 16.303.000		46%	97%	97%	-12,14%	42,92%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Rp 7.707.400	Rp 7.999.850			Rp 7.150.000	Rp 7.948.000			93%	99%	3,79%	11,16%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD			Rp 6.993.000	Rp 6.999.700			Rp 5.740.000	Rp 6.854.000			82%	98%	0,10%	19,41%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Rp 6.993.000	Rp 6.999.795			Rp 6.908.000	Rp 6.964.000			99%	99%	0,10%	0,81%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp 18.953.100				Rp 10.655.700				56%			-100,00%	-100,00%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 20.700.000				Rp 10.315.680				50%				-100,00%	-100,00%
b	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Rp 4.307.561.533	Rp 3.230.104.693	Rp 3.133.314.462	Rp 2.393.127.506	Rp 3.187.503.887	Rp 2.559.905.619	Rp 2.439.570.118	Rp 2.375.277.145	74%	79%	78%	99%	-17,21%	-9,01%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 4.307.561.533	Rp 3.211.648.993	Rp 3.111.030.212	Rp 2.380.730.206	Rp 3.187.503.887	Rp 2.550.167.219	Rp 2.418.714.024	Rp 2.563.093.544	74%	79%	78%	108%	-17,35%	-6,39%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp 5.183.200				Rp 2.997.800				58%			-100,00%	-100,00%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp 13.272.500	Rp 13.255.500	Rp 4.586.600		Rp 6.740.600	Rp 11.920.344	Rp 4.518.600		51%	90%	99%	-32,76%	7,38%
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Rp 8.590.750	Rp 7.310.900			Rp 8.564.470	Rp 7.169.000			100%	98%	-14,90%	-16,29%
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran			Rp 438.000	Rp 499.800			Rp 371.280	Rp 496.000			85%	99%	14,11%	33,59%
c	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**			Rp 2.821.600	Rp 2.988.800			Rp 2.765.000	Rp 2.727.400			98%	91%	5,93%	-1,36%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Rp 2.821.600	Rp 2.988.800			Rp 2.765.000	Rp 2.727.400			98%	91%	5,93%	-1,36%
d	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**		Rp 7.678.000	Rp 103.814.295	Rp 108.699.996		Rp 7.731.000	Rp 30.536.500	Rp 108.407.000		101%	29%	100%	628,40%	275,00%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			Rp 3.838.295	Rp 3.999.996			Rp 3.762.500	Rp 3.850.200			98%	96%	4,21%	2,33%
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Rp 7.678.000	Rp 8.290.000	Rp 8.500.000		Rp 7.731.000	Rp 7.730.000	Rp 8.429.000		101%	93%	99%	3,50%	9,03%
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan			Rp 41.686.000	Rp 21.200.000			Rp 18.944.000	Rp 21.127.800			45%	100%	-49,14%	11,53%
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Rp 50.000.000	Rp 75.000.000			Rp 100.000	Rp 75.000.000			0%	100%	50,00%	74900,00 %
e	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Rp 529.165.700	Rp 196.698.600	Rp 258.462.550	Rp 311.461.600	Rp 219.875.219	Rp 914.026.599	Rp 234.976.822	Rp 303.926.418	42%	465%	91%	98%	-3,64%	90,25%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 5.140.000	Rp 1.806.500	Rp 1.844.000	Rp 1.994.000	Rp 2.455.118	Rp 1.806.500	Rp 1.844.000	Rp 1.844.000	48%	100%	100%	92%	-18,21%	-8,11%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 66.138.400	Rp 40.000.000	Rp 55.758.400	Rp 27.350.000	Rp 93.736.300	Rp 630.330.000	Rp 39.627.000	Rp 22.400.000	142%	1576%	71%	82%	-17,02%	145,09%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 37.921.300	Rp 32.922.600	Rp 38.118.550	Rp 37.544.800	Rp 23.728.700	Rp 32.749.200	Rp 36.906.250	Rp 36.525.000	63%	99%	97%	97%	0,37%	16,56%
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp 15.500.000	Rp 16.852.000	Rp 18.739.600	Rp 17.960.800	Rp 7.559.820	Rp 16.847.380	Rp 14.267.950	Rp 17.945.000	49%	100%	76%	100%	5,26%	44,44%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp 2.880.000	Rp 2.883.500	Rp 2.000.000	Rp 2.000.000	Rp 2.520.000	Rp 2.520.000	Rp 1.920.000	Rp 1.920.000	88%	87%	96%	96%	-15,26%	-7,94%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 57.460.000	Rp 12.750.000	Rp 12.750.000	Rp 10.000.000	Rp 14.323.000	Rp 12.732.000	Rp 12.718.000	Rp 9.999.000	25%	100%	100%	100%	-49,69%	-10,87%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 344.126.000	Rp 129.484.000	Rp 129.252.000	Rp 214.612.000	Rp 75.552.281	Rp 217.041.519	Rp 127.693.622	Rp 213.293.418	22%	168%	99%	99%	1,16%	71,05%
f	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp 150.375.300	Rp 171.446.800	Rp 198.439.000	Rp 240.234.820	Rp 92.946.882	Rp 141.430.791	Rp 133.436.225	Rp 202.563.253	62%	82%	67%	84%	16,94%	32,77%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp 204.400	Rp 1.010.200	Rp 1.313.000	Rp 1.496.820	Rp 196.000	Rp 975.000	Rp 1.300.000	Rp 1.490.000	96%	97%	99%	100%	146,07%	148,47%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 105.150.000	Rp 69.741.000	Rp 69.740.000	Rp 69.740.000	Rp 49.688.454	Rp 63.978.867	Rp 55.308.661	Rp 57.444.229	47%	92%	79%	82%	-33,68%	6,36%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 45.020.900	Rp 100.695.600	Rp 127.386.000	Rp 168.998.000	Rp 43.062.428	Rp 76.476.924	Rp 76.827.564	Rp 143.629.024	96%	76%	60%	85%	60,95%	55,00%
g	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Rp 164.435.675	Rp 72.496.700	Rp 93.947.880	Rp 94.231.880	Rp 135.553.239	Rp 68.519.943	Rp 87.584.000	Rp 84.502.520	82%	95%	93%	90%	-8,67%	-8,38%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Rp 18.198.000	Rp 17.473.000	Rp 17.487.200		Rp 17.117.779	Rp 15.897.000	Rp 15.947.000		94%	91%	91%	-1,95%	-3,41%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 84.647.675	Rp 31.798.700	Rp 31.725.000	Rp 31.994.800	Rp 68.898.964	Rp 29.120.164	Rp 27.405.000	Rp 24.296.800	81%	92%	86%	76%	-20,61%	-24,99%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rp 15.110.000	Rp 15.110.000			Rp 14.759.000	Rp 14.810.000			98%	98%	0,00%	0,35%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp 49.788.000	Rp 7.500.000	Rp 14.999.880	Rp 14.999.880	Rp 41.951.369	Rp 7.458.000	Rp 14.943.000	Rp 14.928.720	84%	99%	100%	100%	5,02%	6,01%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp 30.000.000	Rp 15.000.000	Rp 14.640.000	Rp 14.640.000	Rp 24.702.906	Rp 14.824.000	Rp 14.580.000	Rp 14.520.000	82%	99%	100%	99%	-17,47%	-14,02%
2	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 2.118.822.000	Rp 1.890.582.300	Rp 2.523.818.340	Rp 1.924.500.000	Rp 1.037.112.765	Rp 1.015.808.809	Rp 1.321.204.136	Rp 1.619.368.231	49%	54%	52%	84%	-0,34%	16,86%
a	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	Rp 1.866.609.900	Rp 1.220.566.500	Rp 2.001.663.140	Rp 1.748.403.250	Rp 984.350.415	Rp 599.563.928	Rp 1.211.619.136	Rp 1.516.043.231	53%	49%	61%	87%	5,58%	29,37%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah		Rp 423.529.000	Rp 106.608.000	Rp -		Rp 42.512.700	Rp 44.875.000			10%	42%		-87,41%	-47,22%
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp 33.411.200	Rp 19.199.000	Rp 47.793.000	Rp 62.385.000	Rp 17.560.600	Rp 6.663.500	Rp 38.485.550	Rp 29.868.300	53%	35%	81%	48%	45,64%	131,04%
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Rp 14.579.600												-100,00%	0,00%
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Rp 204.347.200	Rp 68.693.500	Rp 103.860.990	Rp 253.265.300	Rp 44.826.415	Rp 50.070.174	Rp 52.383.300	Rp 207.000.083	22%	73%	50%	82%	42,89%	103,83%
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.614.271.900	Rp 709.145.000	Rp 1.743.401.150	Rp 1.432.752.950	Rp 860.715.600	Rp 500.317.554	Rp 1.075.875.286	Rp 1.279.174.848	53%	71%	62%	89%	23,99%	30,69%
b	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Rp 157.548.100	Rp 229.581.800	Rp 123.125.000	Rp 63.349.850	Rp 30.623.900	Rp 132.250.981	Rp -	Rp -	19%	58%	0%	0%	-16,40%	115,93%
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp 37.453.900	Rp 229.581.800		Rp 63.349.850	Rp 30.623.900	Rp 132.250.981			82%	58%			206,49%	115,93%
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 120.094.200		Rp 123.125.000				Rp -				0%		-100,00%	0,00%
c	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	Rp 94.664.000	Rp 440.434.000	Rp 399.030.200	Rp 112.746.900	Rp 22.138.450	Rp 283.993.900	Rp 109.585.000		23%	64%	27%		94,70%	340,47%
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Rp 42.135.200												-100,00%	0,00%
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp 52.528.800	Rp 440.434.000	Rp 399.030.200	Rp 112.746.900	Rp 22.138.450	Rp 283.993.900	Rp 109.585.000	Rp 103.325.000	42%	64%	27%	92%	219,11%	371,89%
3	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 1.762.964.200	Rp 1.631.286.300	Rp 1.647.240.830	Rp 2.496.544.648	Rp 626.679.341	Rp 655.416.720	Rp 1.165.023.997	Rp 1.900.654.416	36%	40%	71%	76%	15,02%	48,49%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
a	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	Rp 391.468.300	Rp 899.393.900	Rp 499.504.400	Rp 908.381.400	Rp 100.069.250	Rp 193.972.357	Rp 317.921.464	Rp 698.517.201	26%	22%	64%	77%	55,71%	92,48%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Rp 7.365.600	Rp 6.357.750	Rp 21.566.900		Rp 915.600	Rp 1.196.000	Rp 18.191.700		12%	19%	84%	112,77%	725,83%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 24.715.600	Rp 17.338.800	Rp 9.823.350	Rp 406.994.700	Rp 3.353.600	Rp 525.100	Rp 4.286.700	Rp 335.156.890	14%	3%	44%	82%	1323,31%	2783,52%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp 140.493.300	Rp 16.436.300	Rp 5.962.150	Rp -	Rp 21.987.250	Rp 1.500.000	Rp 799.800		16%	9%	13%		-84,01%	-79,95%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		Rp 86.916.300	Rp 147.076.750	Rp 102.144.100		Rp 43.982.990	Rp 108.584.058	Rp 61.704.436		51%	74%	60%	19,33%	51,85%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			Rp 6.211.900	Rp 91.364.950			Rp 1.089.800	Rp 72.715.952			18%	80%	1370,81%	6572,41%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 18.386.200		Rp 9.681.550	Rp 43.074.950	Rp 2.304.400		Rp 2.763.600	Rp 4.810.000	13%		29%	11%	122,46%	-12,98%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp 207.873.200	Rp 19.103.900	Rp 6.244.550	Rp -	Rp 72.424.000	Rp 1.300.000	Rp 1.082.200		35%	7%	17%		-86,04%	-71,65%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia		Rp 728.222.400	Rp 308.146.400	Rp 243.235.800		Rp 145.748.667	Rp 198.119.306	Rp 205.938.223		20%	64%	85%	-39,37%	19,94%
b	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	Rp 807.153.600	Rp 204.813.700	Rp 628.939.400	Rp 550.014.098	Rp 261.070.291	Rp 118.021.381	Rp 406.819.922	Rp 465.103.247	32%	58%	65%	85%	39,97%	68,08%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Rp 4.575.000	Rp 24.651.700	Rp 24.683.698		Rp -	Rp 2.713.200	Rp 22.525.832		0%	11%	91%	219,48%	730,23%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 13.214.800	Rp 4.880.000	Rp 8.621.200		Rp 2.029.500	Rp -	Rp 1.775.800		15%	0%	21%		-28,80%	-100,00%
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Rp 52.598.600	Rp 9.261.700	Rp 7.046.900		Rp 1.480.500	Rp 1.269.800	Rp 796.000		3%	14%	11%		-68,77%	-50,51%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp 741.340.200	Rp 186.097.000	Rp 588.619.600	Rp 525.330.400	Rp 257.560.291	Rp 116.751.581	Rp 401.534.922	Rp 442.577.415	35%	63%	68%	84%	43,55%	66,49%
c	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	Rp 564.342.300	Rp 527.078.700	Rp 518.797.030	Rp 1.038.149.150	Rp 265.539.800	Rp 343.422.982	Rp 440.282.611	Rp 737.033.968	47%	65%	85%	71%	30,64%	41,64%
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		Rp 4.880.000	Rp 25.133.000	Rp 32.138.450		Rp -	Rp 353.000	Rp 31.973.350		0%	1%	99%	221,45%	8957,61%
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 13.643.100	Rp 6.100.000	Rp 9.463.000		Rp 2.277.900	Rp -	Rp 4.183.900		17%	0%	44%		-33,39%	-100,00%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 72.380.400	Rp 9.310.400	Rp 6.543.000		Rp -	Rp 995.500	Rp 353.000		0%	11%	5%		-72,29%	-82,27%
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp 478.318.800	Rp 506.788.300	Rp 477.658.030	Rp 1.006.010.700	Rp 263.261.900	Rp 342.427.482	Rp 435.392.711	Rp 705.060.618	55%	68%	91%	70%	36,94%	39,72%
4	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Rp 805.892.700	Rp 743.229.200	Rp 554.179.700	Rp 2.648.528.480	Rp 105.792.800	Rp 642.765.650	Rp 436.182.225	Rp 1.508.206.584	13%	86%	79%	57%	114,90%	240,40%
a	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**			Rp 234.718.050				Rp 202.978.000				86%		-100,00%	-100,00%
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi			Rp 234.718.050				Rp 202.978.000				86%		-100,00%	-100,00%
b	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	Rp 553.614.900	Rp 600.000.000	Rp 99.384.950	Rp 2.221.249.800		Rp 501.860.000	Rp 79.766.750	Rp 1.356.339.514		84%	80%	61%	686,65%	758,14%
	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				Rp 546.343.300				Rp 1.260.000				0%	0,00%	0,00%
	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			Rp 99.384.950				Rp 79.766.750				80%		-100,00%	-100,00%
	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				Rp 1.026.873.500				Rp 814.350.389				79%	0,00%	0,00%
	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup		Rp 600.000.000				Rp 501.860.000				84%			-100,00%	-100,00%
	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Rp 553.614.900												-100,00%	0,00%
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				Rp 648.033.000				Rp 540.729.125				83%	0,00%	0,00%
c	**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	Rp 252.277.800	Rp 143.229.200	Rp 220.076.700	Rp 427.278.680	Rp 105.792.800	Rp 140.905.650	Rp 153.437.475	Rp 151.867.070	42%	98%	70%	36%	34,86%	13,69%

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-				Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				Rata-Rata Pertumbuhan	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Rp 211.685.600	Rp 75.046.300			Rp 93.953.800	Rp 67.970.300			44%	91%			-82,27%	-63,83%
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif		Rp 115.567.000	Rp 182.534.450	Rp 384.618.330		Rp 52.111.950	Rp 141.719.625	Rp 140.079.460		45%	78%	36%	84,33%	85,40%
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Rp 18.058.400				Rp 11.839.000				66%				-100,00%	-100,00%
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual		Rp 68.182.900	Rp 37.542.250	Rp 42.660.350		Rp 20.823.400	Rp 11.717.850	Rp 11.787.610		31%	31%	28%	-15,65%	-21,57%
	total	**Rp9.884.117.108**	**Rp7.997.199.593**	**Rp8.559.407.807**	**Rp. 10.259.066.775**	**Rp5.451.299.813**	**Rp6.031.786.531**	**Rp5.892.067.648**	**Rp8.343.701.967**	**55%**	**75%**	**69%**	**81%**	**2,60%**	**16,65%**

Dari tabel di atas maka masih perlu perbaikan kualitas penyusunan perencanaan penganggaran dan perbaikan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan. Masih ada beberapa program dan kegiatan yang tidak terlaksana dengan baik, dimana capaian kinerja penyerapan anggarannya sangat rendah.

Untuk melihat ketercapaian kinerja pelayanan sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target jangka menengah, akhir dari periode rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tujuan Organisasi Tahun 2024
dengan Target akhir jangka menengah Renstra Tahun 2021 - 2025

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Rencana Tingkat Capaian Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, responsif dan professional	Persentase capaian target RPJMD	80%	58,70%	73,38
2.	Meningkatkan kualitas inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	32	41,70	130,31

Dari 2 tujuan strategis yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2025, maka capaian sampai dengan tahun 2024 pada tujuan meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berintegritas, reponsif dan profesional masih sesuai dengan perencanaan jangka menengah dengan deviasi capaian hanya sekitar 21,3 %, dengan waktu sisa pelaksanaan 1 tahun lagi. Seharusnya capaian sampai dengan tahun 2024 sudah tercapai 73,38 % dengan deviasi sebesar -6,62 %. Tetapi capaian tahun ke-4 perencanaan ini dibandingkan dengan target akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2025 yaitu 80 % masih baik, walaupun pada sisa pelaksanaan tahun-tahun yang akan datang perlu usaha yang keras. Pada tujuan meningkatnya kualitas inovasi daerah capaian sampai dengan tahun 2024 sudah melebihi target, capaian akhir tahun perencanaan dengan deviasi 9,7 %. Pencapaian ini perlu dipertahankan sampai akhir tahun perencanaan.

Untuk perbandingan capaian sasaran sampai dengan tahun 2024 dibandingkan dengan target akhir tahun perencanaan renstra tahun 2021 - 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Organisasi Sampai Dengan Tahun 2024 dengan Target Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rencana Tingkat Capaian Tahun 2025	Realisasi Tingkat Capaian Tahun 2024	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah	Indeks Perencanaan	100%	96,75%	96,75
		Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	22,90	22,64	98,86
2.	Meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan daerah	Rata-rata capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) RKPD daerah	95%	93,03%	97,93
		Persentase ratarata capaian target IKU Renja PD	97%	96,09%	121,63
		Persentase Program dan Kegiatan RKPD yang tertuang dalam APBD	100%	99,62%	99,62
3.	Meningkatnya daya guna hasil penelitian dan pengembangan	Persentase hasil kelitbangan yang diberdayagunakan	100%	100%	100
4.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan urusan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84	83,95	99,94
		Persentase Penyerapan Anggaran	90%	79,47%	88,3

Dengan asumsi bahwa capaian tahun ke 4 pelaksanaan dokumen perencanaan strategis idealnya adalah 80 %. Dengan 4 sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka menengah dengan 8 indikator kinerja yang diukur, pada tahun 2024 sebagai tahun ke-4 pelaksanaan perencanaan strategis, maka dengan 7 indikator jangka menengah tersebut targetnya sudah berada di atas angka 80 %, dan ada 1 indikator yang capaiannya masih berada di bawah 80 % yaitu pada indikator Persentase Penyerapan Anggaran

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penunjang perencanaan dan penelitian pengembangan, maka capaian kinerja pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.9
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Tahun 2024.

No	Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2024
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,95
3.	Persentase Penyerapan Anggaran	79,47%

Capaian kinerja IKK urusan Perencanaan Pembangunan dari tahun 2021 - 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1.10
Capaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan
Tahun 2021 - 2024

No	Indikator	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja			
			2021	2021	2023	2024
1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA	-	Ada	Ada	Ada	Ada
3	Tersedianya RKPD yang ditetapkan dengan Perkada	-	Ada	Ada	Ada	Ada
4	Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100
5	Persentase rata-rata kinerja capaian target RKPD	%	87	90	92	93,03

Capaian kinerja IKK urusan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.11.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Pemerintahan Bidang
Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021 – 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Capaian Kinerja Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	%	50	100	100	66,67
2.	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan daerah	%	100	66,66	50	100
3.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	%	N/A	N/A	N/A	25
4.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	%	100	100	100	100

Capaian kinerja urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan, belum maksimal, khususnya untuk inovasi daerah. Hal ini karena kegiatan-kegiatan kelitbangan masih sangat sedikit. Setiap tahun kegiatan penelitian dan pengembangan hanya 1 atau 2 kegiatan.

Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Penelitian Pengembangan yaitu Capaian Kinerja Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah untuk Tahun 2024 tidak diperhitungkan lagi.

Kinerja serapan anggaran Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dari tahun 2021 – 2024 rata-rata realisasinya cuma sekitar 76,17 %. Realisasi anggaran tahun 2021 sebesar 81.80 %, pada tahun 2022 realisasi sebesar 73,44 %, pada tahun 2023 turun menjadi 69,97% dan tahun 2024 kembali naik menjadi 79,47%. Pertumbuhan pagu anggaran dari tahun 2020 - 2024 adalah sebesar 7,84 % dan realisasi anggaran dari tahun ke tahun rata-rata terjadi peningkatan 19,46 %. Realisasi anggaran pada tahun 2020 dan 2021 sangat rendah yaitu 53,28 % dan 55,15 % karena terjadinya pandemi covid 19. Pada tahun 2022 sudah mulai meningkat menjadi 75,42 % dan pada tahun 2024 meningkat lagi menjadi 81,33 % dengan rata-rata peningkatan persentase capaian adalah 12,42 %. Belum tercapainya kinerja realisasi anggaran disebabkan beberapa hal seperti :

- Terjadinya efisiensi anggaran.
- Adanya kegiatan yang direncanakan dapat diselesaikan pada tahun tersebut, tetapi mengingat adanya peraturan baru, maka harus dilakukan penyesuaian sehingga beberapa anggaran tidak dapat dilaksanakan.
- Penyelesaian kegiatan terkait harus selesainya produk lain baik dari pemerintah provinsi maupun pusat.
- Adanya anggaran yang tidak dilaksanakan karena sudah mendapat anggaran dari APBN.
- Adanya anggaran yang bersifat antisipasi terhadap kebutuhan koordinasi perencanaan khususnya terhadap program-program pusat.
- Seringkali konsentrasi pada penyusunan APBD yang memerlukan waktu, tenaga dan pemikiran yang lebih banyak, menyebabkan sebagian kegiatan akhirnya tidak dapat diselesaikan.

Ada beberapa tantangan dan peluang yang harus diatasi dan dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Bappelitbangda ke depan. Dari identifikasi tantangan yang akan dihadapi Bappelitbangda adalah :

1. Pemahaman dan komitmen dari mitra kerja Bappelitbangda dalam penyusunan dokumen perencanaan yang sangat beragam.
2. Tuntutan aspirasi masyarakat yang semakin kompleks sementara kemampuan pendanaan pembangunan terbatas.
3. Lingkungan yang selalu berubah dan dengan waktu yang cepat baik tingkat regional, nasional maupun internasional.

Adapun peluang yang harus dimanfaatkan Bappelitbangda dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi adalah :

1. Adanya teknologi informasi yang dapat mendukung sistem informasi manajemen perencanaan dan litbang. Perkembangan dari teknologi informasi harus bisa dimanfaatkan oleh Bappelitbangda dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.
2. Adanya kerangka regulasi / peraturan perundangan yang mendukung penyusunan perencanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan adanya kerangka regulasi yang dibikin pemerintah dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas.

C. Kelompok Sasaran Pelayanan

Kelompok sasaran pelayanan Bappelitbangda yang utama adalah seluruh perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Hulu Sungai

Tengah. Selain kelompok sasaran utama tersebut, maka kelompok sasaran pelayanan Bappelitbangda juga adalah Pemerintahan Desa, kelompok masyarakat, profesi, dan lain-lain.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

A. Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan menggambarkan kinerja pelayanan yang belum sesuai harapan. Perlu adanya analisis permasalahan tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelayanan maupun analisis isu-isu strategis sebagai bahan dan modal utama untuk menyusun dan merumuskan kebijakan pembangunan demi mengantisipasi berbagai permasalahan di perangkat daerah maupun masyarakat. Permasalahan merupakan "gap expectation" antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan. Potensi permasalahan perangkat daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Dari hasil rumusan kinerja pelayanan, maka dirumuskan permasalahan pokok dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan pembangunan dan urusan penelitian dan pengembangan (litbang) maka permasalahan pokoknya adalah *belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan inovasi pembangunan daerah*, yang disebabkan oleh beberapa permasalahan strategis yaitu :

1. Belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya kinerja pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah
3. Belum tingginya inovasi pemerintah daerah
4. Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah

Permasalahan pokok "**Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan inovasi pembangunan daerah**" yang di tandai dengan belum tingginya pencapaian kinerja pemerintah daerah dan inovasi pemerintah daerah yang berkualitas. Hal tersebut tercermin dari capaian kinerja target RPJMD yang belum mencapai 100 % serta capaian makro pembangunan yang belum tinggi dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi dan angka kemiskinan. Belum optimalnya inovasi daerah ditandai dengan nilai indeks Inovasi Daerah pada tahun 2024 baru masuk sebagai kabupaten inovatif dengan nilai 41,70 dari angka 40 - 60. Sudah banyak daerah lain yang mempunyai nilai di atas 60 untuk masuk sebagai kabupaten sangat inovatif. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan inovasi pembangunan daerah disebabkan beberapa permasalahan strategis yaitu :

1. **Belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah**

   Kualitas perencanaan pembangunan digambarkan dengan konsistensi, partisipatif, efektif dan efisien yang disusun berdasarkan kerangka logis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang sangat berpengaruh bagi organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Dari aspek konsistensi, maka penyusunan perencanaan pembangunan harus mampu menyeleraskan dan mengimplementasikan perencanaan pembangunan dari perencanaan jangka panjang, menengah

dan tahunan. Kalau dilihat dari indikator indeks perencanaan, realisasi setiap tahun masih fluktuatif. Walaupun dilihat dari capaian target sudah 100 %, tetapi secara kuantitatif belum mencapai angka 100 %. Pada tahun 2024 indeks perencanaan baru 96,75 % dengan capaian tiap tahun masih fluktuatif. Hal ini menandakan bahwa konsistensi antar dokumen perencanaan belum kuat dan sangat dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan baik internal maupun eksternal yang sangat dinamis, sehingga upaya perlu upaya yang kuat untuk menjaga konsistensi terus menerus agar fokus dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Semakin besar bias dan tidak fokus dalam implementasi perencanaan tahunan maka semakin besar kemungkinan tidak tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan.

Kualitas perencanaan juga dilihat dari aspek partisipatif. Berapa besar aspirasi masyarakat yang selaras dengan prioritas pembangunan dalam penyusunan perencanaan daerah dapat menggambarkan bahwa kualitas perencanaan semakin berkualitas. Masih banyak usulan masyarakat yang belum selaras dengan prioritas pembangunan, sehingga kurang dari 50 % usulan masyarakat belum terakomodir dalam rencana kerja pembangunan daerah.

Kemudian kualitas perencanaan juga bisa dilihat dari capaian indikator nilai SAKIP Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah. Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten baru masuk kategori BB dengan nilai 70,2 dari angka >70 - 80. Kemudian baru beberapa Perangkat Daerah dengan nilai SAKIP masuk katergori A dengan nilai di atas 80. Pencapaian nilai SAKIP Perangkat Daerah juga masih didominasi oleh B dan BB, bahkan masih ada perangkat daerah dengan kategori CC, dibawah 70. Permasalahannya dimulai dari kualitas perencanaan kinerja yang belum baik dalam penyusunan dokumen perencanaan di Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

2. **Belum optimalnya kinerja pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah**

Efektivitas perencanaan dapat diukur dari pencapaian target-target perencanaan yang telah disusun. Hal ini bisa diukur dari pencapaian target perencanaan tahunan maupun target jangka menengah atau lima tahunannya. Semakin tinggi ketercapaian target perencanaan, maka semakin efektif penyusunan perencanaan. Dari data informasi capaian kinerja, ternyata masih ada bias pencapaian target perencanaan baik untuk lima tahunan maupun tahunan. Pencapaian target RPJMD periode 2021 - 2025, pada tahun ke-4 baru tercapai 58,70 % dari target 60 % atau 97,83 %. Kalau kita lihat dari tahun ke tahun deviasinya semakin melebar, dan semakin mendekati akhir tahun perencanaan, maka semakin besar deviasinya, sehingga diproyeksikan pada akhir tahun perencanaan tidak bisa tercapai 100 %. Pencapaian target RPJMD ini sangat dipengaruhi oleh pencapaian target perencanaan tahunan. Rata-rata setiap tahun pencapaian target perencanaan tahunan juga tidak mencapai 100 %.

3. **Belum tingginya inovasi pemerintah daerah**

Hal ini terlihat dari capaian indikator indeks inovasi yang baru masuk kategori kabupaten inovatif dengan nilai masih diangka 41,70 dari angka >40 - 60. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain yang sudah masuk kategori kabupaten sangat inovatif dengan nilai di atas 60, maka kabupaten Hulu Sungai Tengah masih tertinggal, bahkan tahun-tahun sebelumnya masih masuk kategori kabupaten tidak inovatif.

Permasalahan tersebut disebabkan oleh tidak merata dan belum banyaknya muncul inovasi oleh perangkat daerah. Inovasi yang muncul masih terjadi pada beberapa perangkat daerah tertentu. Seharusnya dalam rangka percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka diperlukan perlu inovasi-inovasi. Inovasi ini harus muncul dari pelaku / pelaksana pembangunan seperti perangkat daerah maupun dari kelompok masyarakat ataupun individu. Dengan belum banyaknya inovasi yang muncul menyebabkan juga HAKI juga masih rendah.

Dalam hal penyusunan perencanaan pembangunan daerah seharusnya juga didukung oleh data informasi yang valid dari hasil kajian mendalam. Selama ini penyusunan perencanaan daerah sangat minim didukung hasil kajian litbang. Minimnya hasil kajian litbang, menjadi kendala dalam peningkatan kinerja penyusunan perencanaan pembangunan. Dari data dan informasi hasil litbang yang dihasilkan baru bisa 1-2 topik kajian setiap tahunnya. Permasalahan lainnya adalah belum mampunya menyajikan hasil litbang yang sesuai kebutuhan ataupun yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan situasi kondisi.

4. **Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah.**

Hal ini ditandai dengan nilai SAKIP Bappelitbangda yang belum optimal, dengan capaian baru 83,95. Ini juga menandakan "Belum optimalnya akuntabilitas penyelenggaraan urusan perencanaan dan litbang". Masih perlu peningkatan baik pada komponen perencanaan kinerja, pengukuran, pelaporan maupun evaluasi kinerja.

Selain kualitas dan efektifitas perencanaan, maka proses penyelenggaraan urusan pemerintahan juga harus akuntabel yaitu perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan dan sah diterima masyarakat, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, efisien dalam menggunakan sumberdaya, efektif dalam pemecahan solusi masalah, memberi keleluasaan dan kemudahan, dan melihat kepentingan masyarakat banyak. Peningkatan kinerja dan produktivitas harus terus dilakukan untuk menjawab tantangan dalam penyusunan perencanaan.

Dari analisis maka penyebab masalah-masalah strategis tersebut di atas adalah :

Tabel 2.1.12
Masalah Strategis, Masalah dan Akar Masalah dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja dan inovasi pembangunan daerah	Belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Belum optimalnya penyusunan perencanaan pembangunan daerah
			Belum optimalnya keselarasan dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah dan perangkat daerah
			Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi hasil pembangunan
			Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Kurang optimalnya kualitas SDM perencana PD
			Belum optimalnya efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah
		Belum optimalnya kinerja pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah	Belum optimalnya penerapan manajamen risiko dalam perencanaan
			Belum optimalnya kualitas pengukuran kinerja
			Kurang optimalnya koordinasi, kolaborasi antar pemerintahan dan internal pemerintahan
			Kurangnya acuan keterpaduan rencana aksi
			Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
		Belum tingginya inovasi pemerintah daerah	Belum optimalnya kualitas hasil litbang dan inovasi daerah
			Tidak ada SDM peneliti, Lemahnya inovasi PD, Belum optimalnya data dan informasi, Lemahnya identifikasi kebutuhan litbang, Kurangnya desiminasi hasil litbang, Belum optimalnya jejaring litbang
			Kurangnya pengajuan HAKI
			Kurangnya informasi tentang HAKI
			Kurangnya kesadaran masyarakat tentang HAKI
		Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah	Belum optimalnya perencanaan kinerja urusan perencanaan dan litbang daerah
			Belum optimalnya penyusunan perencanaan strategis
			Belum optimalnya penyediaan data dan informasi
			Belum optimalnya pemenuhan pengukuran kinerja
			Belum optimalnya pelaksanaan dan pengukuran kinerja
			Belum optimalnya kualitas pengukuran kinerja
			Belum optimalnya implementasi pengukuran kinerja
			Belum optimalnya penyajian dan kualitas informasi kinerja

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
			Belum optimalnya evaluasi dan pelaporan serta pencapaian sasaran kinerja
			Belum optimalnya pemanfaatan informasi kinerja

B. Isu Strategis Perangkat Daerah.

Isu strategis yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana strategis dapat dikategorikan ke dalam isu global, nasional, regional dan lokal. Isu global yang harus diperhatikan adalah bagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi komitmen negara-negara di dunia bisa diturunkan, diselaraskan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ada 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan beserta indikator-indikator dan target yang harus sudah tercapai sampai dengan tahun 2030. Isu global ini harus dapat diimplementasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah agar target-target tersebut bisa tercapai.

Isu strategis nasional yang juga harus menjadi perhatian adalah perwujudan dari visi, misi, tujuan dan sasaran serta prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029. Merupakan kewajiban seluruh daerah untuk dapat bersama-sama mendukung perwujudan dari rencana pembangunan nasional tersebut. Asta cita yaitu (1) Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM); (2) Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa; (3) Meningkatkan Lapangan Kerja Berkualitas dan Mendorong Kewirausahaan; (4) Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, dan Prestasi Olahraga; (5) Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri; (6) Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan; (7) Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi; (8) Memperkuat Penyelerasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama; yang juga menjadi prioritas pembangunan nasional juga menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk dapat mewujudkan misi tersebut. Langkah awal dari perwujudan misi dan prioritas nasional tersebut adalah integrasi dan dukungan pemerintah daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Seperti halnya isu nasional, maka isu regional yang harus menjadi perhatian pemerintah kabupaten adalah visi, misi, tujuan dan

sasaran serta prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029. Visi Provinsi Kalimantan Selatan adalah " Kalimantan Selatan Bekerja (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan" dengan prioritas pembangunan yaitu (1) memperkuat pembangunan manusia yang unggul, berbudaya dan berakhlak mulia; (2) Memantapkan pembangunan infrastruktur yang handal; (3) memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata dan syariah; (4) memperkuat ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim; dan (5) memantapkan tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat. Seperti halnya isu nasional perencanaan berupa RPJMN, maka isu regional yang harus diselaraskan juga ke dalam perencanaan kabupaten adalah RPJMD Prov. Kalimantan Selatan. Prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD harus selaras dan didukung dalam perencanaan pembangunan kabupaten.

Isu lokal yang juga harus menjadi perhatian dalam penyusunan perencanaan adalah RPJPD kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2045 serta perencanaan sektoral lainnya seperti RTRW, visi misi calon Kepala daerah dan lain-lain. Visi jangka panjang daerah yaitu "Terwujudnya Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai Pusat Jasa dan Logistik yang Sejahtera, Unggul, Maju dan Berkelanjutan" dengan sasaran visi yaitu (1) meningkatnya PDRB per kapita menuju setara pendapatan golongan ekonomi menengah negara maju; (2) menurunnya kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang; (3) meningkatnya daya saing daerah; (4) meningkatnya daya saing sumberdaya manusia; (5) meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup. Adapun sasaran pokok pembangunan jangka panjang adalah (1) terwujudnya SDM yang berkualitas; (2) terwujudnya perekonomian daerah yang inklusif; (3) terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif; (4) terwujudnya stabilitas daerah; (5) terwujudnya lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan berbudaya masyarakat maju (6) terwujudnya daerah yang berdaya saing; (7) terwujudnya ketahanan energi, air dan kemandirian pangan; dan (8) pembangunan yang selaras dan berkelanjutan. Periode perencanaan strategis pada periode 2025 - 2029 adalah tahapan pertama dari 4 tahapan pembangunan RPJPD dengan tema Perkuatan Fondasi. Kebijakan pembangunan jangka panjang baik berupa sasaran pokok, indikator, target maupun arah kebijakan khususnya tahap ke-1 RPJPD harus mampu dioperasionalkan ke dalam penyusunan perencanaan jangka menengah tahun 2025-2029 maupun dalam penyusunan perencanaan tahunannya.

Peraturan Daerah tentang RTRW juga menjadi isu strategis lokal yang harus mampu diselaraskan ke dalam penyusunan perencanaan daerah sehingga pembangunan tidak bertentangan rencana tata ruang peruntukannya. Pada RTRW telah ditetapkan struktur dan pola ruang. Pada struktur ruang terdiri dari rencana sistem perkotaan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem jaringan prasarana lainnya. Sedang pola ruang terbagi atas kawasan lindung, kawasan budidaya dan kawasan strategis. Bappelitbangda dalam menjalankan pelayanan tupoksinya, secara khusus tidak ada keterkaitan dengan ruang.

Keterkaitan antara RTRW dan produk perencanaan lainnya adalah bahwa RTRW menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pembangunan. Setiap dokumen perencanaan yang

berkaitan dengan ruang agar memperhatikan RTRW. Perencanaan spasial harus berpedoman pada RTRW. Dengan indikasi rencana struktur dan pola ruang yang ada pada RTRW akan membantu pelaksanaan tugas Bappelibangda dalam penyusunan perencanaan pembangunan spasial yang lebih baik dan berkualitas serta berkelanjutan. Pada sisi lain, RTRW akan menjadi isu strategis untuk perwujudannya khususnya konsistensi pemanfaatan ruang untuk pembangunan akibat dari berkembangnya kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu sinkronisasi dan harmonisasi RTRW dengan dokumen perencanaan lainnya akan menjadi isu dalam pelaksanaan tupoksi Bappelitbangda.

Selain itu penyusunan perencanaan daerah juga harus mampu mewujudkan dari visi misi Kepala Daerah terpilih serta mampu merencanakan perwujudan program prioritas atau janji politik Kepala Daerah terpilih. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Religius, Sejahtera dan Bermartabat"

Visi ini menekankan pentingnya nilai-nilai religiusitas, kesejahteraan, dan martabat masyarakat sebagai dasar dalam membangun penguatan fondasi ekosistem yang mendukung peran Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik. Penjelasan dari masing – masing elemen adalah sebagai berikut :

Religius berupa nilai-nilai religius akan menjadi sumber pengambilan kebijakan dalam perwujudan penguatan fondasi sebagai pusat jasa dan logistik. Nilai-nilai religius juga menjadi sumber pijakan dalam rangka perwujudan dari peningkatan kesejahteraan, keunggulan, kemajuan dan keberlanjutan.

Sejahtera menggambarkan upaya bahwa Kesejahteraan masyarakat yang akan dicapai akan diselaraskan dengan sumber kesejahteraan yang menitik beratkan pada potensi ekonomi lokal dan keberlanjutannya untuk penguatan fondasi pembentukan Kabupaten Hulu Sungai Tengah sebagai pusat jasa dan logistik.

Bermartabat menggambarkan upaya untuk meraih keunggulan dan kemajuan yang berkelanjutan dengan titik berat pada penguatan fondasi sebagai pusat jasa dan logistik.

Berdasarkan visi yang telah ditetapkan, maka disusun misi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Hulu Sungai Tengah tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.
2. Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan Pembangunan
3. Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
4. Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, maka secara keseluruhan langkah awalnya adalah penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas yang betul-betul mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih. Sebagai pusat perencanaan dan pengendalian pembangunan serta litbang daerah maka Bappelitbangda harus mampu menyusun perencanaan tahunan yang sistematis, sinergis, akuntabel dan partisipatif dengan sandaran kajian ilmiah hasil penelitian sehingga dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Penyusunan perencanaan juga harus mampu membuat alat ukur pengukuran kinerja yang mampu menggambarkan keberhasilan pencapaian visi dan misi. Menjadi tugas Bappeltbangda untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dengan meningkatkan kualitas dan efektivitas perencanaan daerah. Semakin baik perencanaan daerah dengan indikator kinerja yang jelas akan semakin baik akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah. Menjadi tugas Bappelitbangda untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan dukungan kebijakan hasil dari litbang.

Isu lainnya yang harus diperhatikan bagi Bappelitbangda dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan adalah memperhatikan kelestarian lingkungan sesuai dengan hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). Setiap pembangunan yang memerlukan ruang tentunya akan berdampak pada lingkungan baik positif maupun negatif. Setiap kegiatan pembangunan akan memberikan frekuensi dampak yang berbeda-beda, sehingga setiap perencanaan pembangunan harus mampu memilih tindakan yang berdampak negatif sekecil mungkin kepada lingkungan.

Dari uraian di atas, maka isu-isu strategis perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan Bappelitbangda adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan yang berkualitas yang mempertimbangkan keselarasan dan konsistensi aspek tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, serta perencanaan pusat dan provinsi serta kepentingan masyarakat.
2. Efektifitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas dalam Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan penerapan manajemen risiko.
3. Peningkatan inovasi untuk pencapaian kinerja yang didukung juga dengan perbaikan kebijakan dengan pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan
4. Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan urusan perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah.

Masa yang akan datang pengembangan kelembagaan Bappelitbangda ditekankan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang dimiliki. Disamping itu Anggaran berbasis kinerja adalah dasar dari pengembangan sistem penganggaran masa depan. Sasaran dan indikator pencapaian hasil dari program pembangunan perlu dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Alokasi anggaran SKPD berbasis kepada kinerja masing-masing yang mengarah kepada pencapaian cost effectiveness yang tinggi.

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintah yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, maka sistem pengendalian dan evaluasi harus

dioptimalkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya dalam rangka :

a. Meningkatkan konsistensi antar kebijakan yang dilakukan berbagai organisasi publik dan antara kebijakan makro dan mikro maupun antara kebijakan dan pelaksanaan.
b. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan program.
c. Menyelaraskan perencanaan program dan penganggaran.
d. Meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan sumberdaya dan keuangan publik.
e. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan yang terukur, perencanaan, dan pelaksanaan sesuai RPJMD, sehingga tercapai efektivitas perencanaan.

Melalui pengendalian dan evaluasi yang efektif maka berbagai kekeliruan atau penyimpangan dalam perencanaan dan atau kegagalan dalam pencapaian indikator keberhasilan terutama output dan outcome sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat diketahui sedini mungkin, sehingga alternatif pemecahannya dapat segera dirumuskan dan diimplementasikan untuk mencegah terjadinya dampak negatif yang lebih besar.

Tabel 2.1.13
Perumusan Isu Strategis Badan Perncanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
1		Belum optimalnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah.	Isu strategis KLHS yang harus diakomodir dalam penyusunan perencanaan daerah	Kebijakan 17 Tujuan TPB beserta masing-masing indikator yang harus diintegrasikan ke dalam perencanaan daerah	Prioritas pembangunan nasional (asta cita) yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang harus didukung oleh pemerintah daerah	Visi, Misi dan Prioritas Pembangunan Prov. Kalsel yang tertuang dalam RPJMD Prov. Kalsel yang harus didukung oleh pemerintah daerah	Perencanaan yang berkualitas yang mempertimbangkan keselarasan dan konsistensi aspek tata ruang dan pembangunan berkelanjutan, serta perencanaan pusat dan provinsi serta kepentingan masyarakat
2		Belum optimalnya kinerja pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah	Target SDGs yang sudah tercapai, belum tercapai dan tidak tercapai	Pada tahun 2030 target indikator SDGs sudah harus tercapai	dinamisnya kebijakan nasional yang harus disesuaikan pemerintah daerah Perencanaan pembangunan yang berbasis risiko	Kewenangan provinsi dan kabupaten	Efektifitas dan Efisiensi serta Akuntabilitas dalam Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerahdengan penerapan manajemen risiko

No	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
				Global	Nasional	Regional	
3		Belum tingginya inovasi pemerintah daerah		Tujuan TPB Ke 9 yaitu Industri, Inovasi dan Infrastruktur;	Peningkatan Inovasi menjadi sasaran dan arah kebijakan nasional	Peningkatan Inovasi menjadi sasaran dan arah kebijakan serta indikator pembangunan prov. Kalsel	Peningkatan inovasi untuk pencapaian kinerja yang didukung juga dengan perbaikan kebijakan dengan pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengkajian Sebagai Bahan Perencanaan Pembangunan
4		Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola urusan perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan daerah		Menjadi pilar pembangunan SDGs yaitu pembangunan hukum dan tata kelola	Menjadi prioritas pembangunan nasional	Menjadi prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan Tata Kelola Pelaksanaan urusan perencanaan dan penelitian serta pengembangan daerah.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga perumusan tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam (5) lima tahun mendatang harus berpedoman pada visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 – 2029.

Penetapan tujuan dan sasaran dalam perencanaan strategis merupakan tahap terpenting dalam perencanaan pembangunan yang menjadi dasar penyusunan kinerja Bappelitbangda untuk periode 5 (lima) tahun mendatang. Tujuan yang ditetapkan merupakan perumusan kebijakan untuk mengimplementasikan sasaran RPJMD. guna efektivitas dan efisiensi serta terkendalinya pelaksanaan pembangunan. Penyusunan program dan kegiatan pembangunan lebih mudah dilakukan untuk ketepatan tujuan dalam upaya mewujudkan visi misi pembangunan daerah.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun sesuai dengan periode perencanaan. Tujuan yang telah ditetapkan oleh perangkat daerah merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan sasaran RPJMD yang menunjukkan hasil akhir dalam jangka waktu tertentu. Dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis daerah, pernyataan tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang dan juga diselaraskan dengan amanat pembangunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu gambaran kondisi atau hasil yang akan dicapai dari tujuan secara nyata pada akhir periode rencana pembangunan menengah. Masing-masing tujuan dalam rumusan sasaran direncanakan lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator kinerja beserta targetnya.

Visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029, adalah :

” TERWUJUDNYA HULU SUNGAI TENGAH YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERMARTABAT ”

Misi merupakan upaya strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi pembangunan dengan cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk menjaga komitmen dan konsistensi kinerja yang harus dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan. Berdasarkan Visi RPJMD yang telah ditetapkan, maka ditetapkan pula 4 (empat) Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perubahan sosial masyarakat menuju masyarakat adaptif, berdaya saing dan berkualitas hidup tinggi yang religius berbudaya.

2. Mewujudkan perubahan perekonomian daerah secara merata dengan pengembangan menyeluruh dari hulu dan hilirisasi pertanian serta sektor potensial pendukung dengan prinsip kerakyatan yang memperhatikan kesinambungan pembangunan.
3. Meningkatkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dengan prinsip berkelanjutan dalam mendukung pengembangan sektor potensial perekonomian daerah dan pelayanan masyarakat.
4. Mewujudkan pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata Kelola profesional.

Mempetimbangkan Misi RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut diatas, dan dengan menyesuaikan terhadap tupoksi dari Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka Misi RPJMD yang akan diemban oleh Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam kurun waktu 5 tahun (2025-2029), adalah merujuk kepada Misi Keempat (Misi 4).
Misi ini dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran yaitu :

Tabel 3.1.1 Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD

Misi	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator
Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan "Ber Akhlak"	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	● Nilai SAKIP ● Nilai EKPPD ● Opini BPK
			Meningkatnya kualitas pelayanan dan digitalisasi pemerintahan	● Indeks Pelayanan Publik (IPP) ● Indeks SPBE dan / Indeks Pemdi
			Meningkatnya integritas pemerintah daerah	● Nilai Survei Penilaian Integritas ● Nilai rata-rata SPIP Terintegrasi

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran jangka menengah tersebut maka sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappelitbangda maka keterkaitannya adalah pada sasaran RPJMD **“Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”.** Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja digambarkan dengan adanya upaya untuk memperkuat pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan peningkatan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, serta penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perencanaan Kinerja adalah merencanakan kegiatan dan target kinerja yang jelas, terukur, dan selaras dengan visi dan misi organisasi. Pengukuran Kinerja adalah mengembangkan indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai,

relevan, dan terikat waktu (SMART) untuk memantau kemajuan. Pelaporan Kinerja adalah menyajikan informasi kinerja yang akurat, transparan, dan tepat waktu, termasuk perbandingan antara perencanaan dan hasil. Evaluasi Kinerja adalah melakukan evaluasi terhadap pencapaian kinerja, mengidentifikasi kelemahan, dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Sedang implementasi SAKIP merupakan upaya mengintegrasikan seluruh komponen manajemen kinerja ke dalam sistem akuntabilitas yang terstruktur.

Dengan melihat tugas pokok dan fungsi, permasalahan pelayanan, isu strategis serta berpedoman pada sasaran RPJMD maka ditetapkan tujuan strategis Bappelitbangda adalah :

"Meningkatkan Kinerja Pembangunan Jangka Menengah dan Inovasi Daerah"

Dalam upaya mewujudkan tujuan tersebut, ditetapkan indikator untuk mengukur ketercapaian tujuan. Indikator kinerja tujuan yang digunakan adalah:

- Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)"
- Indeks Inovasi Daerah

Dari tujuan strategis tersebut, maka ditetapkan sasaran strategis. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai adalah :

a. Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan daerah
b. Meningkatnya pencapaian sasaran Pembangunan daerah
c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah
d. Meningkatnya kualitas tata kelaola pemerintahan Perangkat Daerah

Dalam upaya mewujudkan sasaran tersebut, ditetapkan indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran, seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator Sasaran
1	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	● Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	● Indeks Perencanaan ● Nilai Komponen perencanaan SAKIP

No	Tujuan	Indikator	Sasaran	Indikator S
		● Indeks Inovasi Daerah	Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan daerah	● Persentase capaian IKU RKPD ● % PD yang berkinerja tinggi
			Meningkatnya kualitas inovasi daerah	● Rata-rata tingkat kematangan Inovasi
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	● Nilai SAKIP Perangkat Daerah ● Indeks Inovasi Perangkat Daerah ● Persentase Tingkat kepuasan layanan

Sasaran jangka menengah dan indikator kinerja beserta target kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Pada
Badan Perncanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah		Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	%	97,82	98	98,5	99	99,5	100	100	
			Indeks Inovasi Daerah	Indeks (angka)	41,7	48	56	66	78	92	100	
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	indeks perencanaan	Indeks (angka)	96,75	97	98	99	99,5	100	100	
			Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Angka	22,64	22,9	24,5	26	28	30	30	
		Meningkatnya Pencapaian sasaran Pembangunan daerah	Persentase capaian IKU RKPD	%	93,03%	94,00	94,50	95,00	95,50	96,00	96,50	
			Persentase PD yang berkinerja tinggi	%	88,74%	89,24	89,74	90,24	90,75	91,24	91,74	

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
						2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Rata-rata tingkat kematangan Inovasi daerah	Angka	59	60	65	70	75	80	90	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat daerah	Angka	83,95	84,50	85,10	85,75	86,25	86,75	87,00	
			Indeks Inovasi Perangkat Daerah	Indeks	0	45	50	55	60	65	70	
			Tingkat kepuasan layanan kesekretariatan	%	0	75	76	77,5	80	82,5	85	

3. 2 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "teknik" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif mengenai bagaimana Bappelitbangda mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategisnya dengan efektif dan efisien. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Adapun strategi yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut di atas adalah :

1. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2. Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah
3. Peningkatan kualitas litbang dan inovasi daerah
4. Peningkatan fasilitasi pengajuan HAKI
5. Peningkatan perencanaan kinerja perangkat daerah
6. Peningkatan pelaksanaan dan pengukuran kinerja perangkat daerah
7. Peningkatan evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah

3. 3 Arah Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran perangkat daerah.

1. Peningkatan konsistensi dan keselarasan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan
3. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan akuntabel
4. Mengoptimalisasi pemanfaatan SIPD dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
5. Implementasi sistem e-Monev berbasis indikator kinerja
6. Peningkatan kualitas SDM Perencana
7. Peningkatan penyediaan data dan informasi
8. Peningkatan penyusunan perencanaan berbasis manajemen risiko
9. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja rencana pembangunan
8. Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintahan dan intern pemerintahan
9. Peningkatan keterpaduan rencana aksi pembangunan
10. Peningkatan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
11. Peningkatan kerjasama dan kemitraan antar lembaga
12. Mendorong lahirnya inovasi-inovasi pembangunan
13. Peningkatan kapabilitas penyusunan kebutuhan litbang
14. Peningkatan diseminasi dan penerapan hasil litbang
15. Peningkatan jejaring kelembagaan litbang

16. Peningkatan edukasi masyarakat tentang HAKI
17. Peningkatan penyusunan perencanaan strategis kinerja tahunan perangkat daerah
18. Peningkatan pemenuhan pengukuran kinerja perangkat daerah
19. Peningkatan kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah
20. Peningkatan implementasi pengukuran kinerja perangkat daerah
21. Peningkatan penyajian dan kualitas informasi kinerja perangkat daerah
22. Peningkatan pemanfaatan informasi kinerja perangkat daerah

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3.1

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

VISI (RPJMD)	:	**Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Religius, Sejahtera dan Bermartabat**		
MISI (RPJMD)	:	**Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.**		
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah	1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan konsistensi dan keselarasan penyusunan perencanaan pembangunan daerah
				Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan
				Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan akuntabel
				Mengoptimalisasi pemanfaatan SIPD dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan
				Implementasi sistem e-Monev berbasis indikator kinerja.
				Peningkatan kualitas SDM Perencana
				Peningkatan penyediaan data dan informasi
		Meningkatnya Pencapaian sasaran pembangunan daerah	Peningkatan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah	Peningkatan penyusunan perencanaan berbasis manajemen risiko
				Peningkatan kualitas pengukuran kinerja rencana pembangunan

VISI (RPJMD)	:	**Terwujudnya Hulu Sungai Tengah Yang Religius, Sejahtera dan Bermartabat**		
MISI (RPJMD)	:	**Mewujudkan Pemerintahan yang tanggap dan santun dengan tata kelola profesional.**		
Tujuan		**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
				Peningkatan koordinasi dan kolaborasi antar pemerintahan dan intern pemerintahan
				Peningkatan keterpaduan rencana aksi pembangunan
				Peningkatan pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah	Peningkatan kualitas litbang dan inovasi daerah	Peningkatan kerjasama kemitraan dengan lembaga penelitian
				Mendorong lahirnya inovasi-inovasi pembangunan
				Peningkatan kapabilitas penyusunan kebutuhan litbang
				Peningkatan desiminasi dan penerapan hasil litbang
				Peningkatan kerjasama jejaring litbang
			Peningkatan fasilitasi pengajuan HAKI	Peningkatan edukasi masyarakat tentang HAKI
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan pemerintahan urusan perencanaan dan litbang	Peningkatan penyusunan perencanaan kinerja perangkat daerah	Peningkatan penyusunan perencanaan strategis kinerja tahunan perangkat daerah
				Peningkatan pemenuhan pengukuran kinerja perangkat daerah
			Peningkatan pelaksanaan dan pengukuran Kinerja perangkat daerah	Peningkatan kualitas pengukuran kinerja perangkat daerah
				Peningkatan implementasi pengukuran kinerja perangkat daerah
			Peningkatan evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah	Peningkatan penyajian dan kualitas informasi kinerja perangkat daerah
				Peningkatan pemanfaatan informasi kinerja perangkat daerah

Tabel 3.3.2
Arah Kebijakan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RENSTRA PD	Arah Kebijakan RPJMD	KET.
1	Penyusunan dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD sesuai siklus dan regulasi	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan akuntabel	Implementasi budaya birokrasi ber - AKHLAK	UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri No. 86 Tahun 2017
2	Penggunaan sistem informasi perencanaan pembangunan (SIPD-RI)	Mengoptimalisasi pemanfaatan SIPD dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	Mendorong pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi,transparansi perencanaan dan penganggaran, dan pengadaan barang jasa serta transparansi layanan perizinan berbasis digital	Permendagri No. 70 Tahun 2019 tentang SIPD
3	Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan berbasis indikator dan e-Monev	Implementasi sistem e-Monev berbasis indikator kinerja.	Pengembangan smart government untuk penguatan penguatan aspek pemerintahan digital	Permendagri no. 86 Tahun 2017

Untuk mencapai tujuan, sasaran perencanaan strategis 5 (lima) tahunan ini, maka perlu dilakukan pentahapan pelaksanaannya dalam setiap tahun sebagai tema rencana kerja tahunan. Adapun penahapan strategi pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah selama periode 2025–2029 disajikan dalam tabel berikut.

Table 3.3.3
Pentahapan Renstra Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Penguatan fondasi Peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan inovasi Pembangunan Daerah	Percepatan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan inovasi pembangunan Daerah	Penguatan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan inovasi pembangunan Daerah	Pemantapan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan inovasi pembangunan Daerah	Perwujudan peningkatan kualitas akuntabilitas kinerja dan inovasi pembangunan Daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan urusan yang diemban Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Tengah baik berupa program yang mendukung pencapaian RPJMD maupun pelaksanaan urusan wajib pemerintah daerah yaitu sebagai berikut :

a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
   Sasaran program adalah : Meningkatnya penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah.
   Indikator capaian sasaran program adalah Persentase perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu, Persentase usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas Pembangunan, Persentase PD dengan capaian IKU minimal sebesar 90 % dan Persentase PD dengan MR berjalan baik
   Kegiatan program ini adalah :
   - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
     Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya pelaksanaan tahapan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan daerah.
     Indikator capaian kegiatan adalah Persentase Pelaksanaan tahapan penyusunan sesuai waktunya, dan Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan penyusunan
   - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
     Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya penerapan manajemen risiko, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan.
     Indikator capaian kegiatan adalah Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun MR, dan Persentase program pembangunan daerah yang berkinerja tinggi.
   - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
     Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya analisis kebijakan perencanaan pembangunan
     Indikator capaian kegiatan adalah Persentase kelengkapan kertas kerja rumusan kebijakan perencanaan yang dihasilkan.
   - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah
     Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan.
     Indikator capaian kegiatan adalah Persentase ketersediaan data dan informasi

b. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran program adalah : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang.

Indikator capaian sasaran program adalah Persentase keselarasan RKPD dg RPJMD, persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD, dan persentase keselarasan program Nasional, Provinsi dan Daerah.

Kegiatan:

- Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

  Indikator capaian kegiatan adalah persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD), dan persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD

- Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang perkonomian dan SDA.

  Indikator capaian kegiatan adalah persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD), dan persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD

- Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang infrastruktur dan kewilayahan.

  Indikator capaian kegiatan adalah persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD), dan persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD

c. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Sasaran program adalah : Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan.

Indikator capaian program ini adalah Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan, dan persentase HAKI yang difasilitasi

Kegiatan :

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang ekonomi dan pembangunan.

  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah.

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang pemerintahan.

  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah.

- Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang sosial.
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah.

- Pengembangan Inovasi dan Teknologi
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang HAKI
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase pertumbuhan usulan HAKI.

d. Program Riset dan Inovasi Daerah
Sasaran Program adalah : Meningkatnya pertumbuhan inovasi daerah.
Indikator capaian program ini adalah Persentase pertumbuhan inovasi.

Kegiatan :
- Invensi dan Inovasi
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatkan inovasi baru dari hasil riset.
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase produk baru yang dihasilkan dari kegiatan invensi dan inovasi.
- Penelitian, pengembangan pengkajian dan penerapan
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya kaji terap.
  Indikator capaian kegiatan adalah persentase kaji terap yang berhasil dilaksanakan.

e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sasaran program adalah : meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah
Indikator capaian program adalah persentase kegiatan tepat waktu, persentase penyusunan perencanaan pelaporan tepat waktu, Nilai audit kearsipan Perangkat Daerah, dan Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti.
Kegiatan :
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja.
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan.
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu.
- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya administrasi BMD.
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase administrasi BMD PD berjalan sesuai standar
- Administrasi Kepegawaian PD
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian.
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase pegawai PD yang terlayani

- Administrasi Umum PD
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya ata kelola administrasi umum.
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya pengadaan BMD.
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase pengadaan BMD PD yang terpenuhi
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Sasaran Kegiatan adalah : Meningkatnya penyediaan jasa umum.
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  Sasaran Kegiatan adalah : Terpeliharanya BMD.
  Indikator capaian kegiatan adalah Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara

Tabel 4.1.1
Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Renstra Perangkat Daerah

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja dan keuangan	Meningkatkan kinerja pembangunan jangka menengah dan inovasi daerah				Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)		
					Indeks Inovasi Daerah		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			indeks perencanaan		
					Nilai Komponen Perencanaan SAKIP		
			Meningkatnya Keselarasan Perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang		persentase keselarasan RKPD dg RPJMD	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD		
					Persentase keselarasan program nasional, provinsi dan daerah		

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang perkonomian dan SDA	Persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan\ Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			Meningkatnya penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah		**Persentase perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu**	**Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan		
				Meningkatnya pelaksanaan tahapan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan daerah	Persentase pelaksanaan tahapan penyusunan sesuai waktunya	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan penyusunan		
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Pelaksanaan Konsultasi Publik	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
				Meningkatnya analisis kebijakan perencanaan pembangunan	Persentase kelengkapan kertas kerja rumusan kebijakan perencanaan yang dihasilkan	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan	Persentase ketersediaan data dan informasi	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Persentase ketepatan waktu pengisian data dan informasi perencanaan dalam SIPD		
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
		Meningkatnya Pemcapaian sasaran pembangunan daerah			**Persentase capaian IKU RKPD**		
					Persentase PD yang berkinerja tinggi		

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Meningkatnya penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah		**Persentase PD dengan capaian IKU minimal sebesar 90 %**	**Program Perencanaan Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	
					Persentase PD dengan MR berjalan baik		
				Meningkatnya penerapan manajemen risiko, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	Persentase PD yang menyusun MR	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Persentase program pembangunan daerah yang berkinerja tinggi		
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala PelaksanaanPembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Meningkatnya kualitas inovasi daerah			**Rata-rata tingkat kematangan Inovasi daerah**		
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan		**Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	
					Persentase HAKI yang difasilitasi		
				Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Persentase penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitiandan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang pemerintahan	Persentase penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PENGKAJIAN PERATURAN	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	
					Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya IzinPenelitian oleh Instansi yang Berwenang	
				Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang sosial	Persentase penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIDANG SOSIAL DANKEPENDUDUKAN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisat	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang HAKI	Persentase pertumbuhan usulan HAKI	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-hasil Kelitbangan	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya pertumbuhan inovasi daerah		**Persentase pertumbuhan inovasi**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya inovasi baru dari hasil riset	Persentase produk baru yang dihasilkan dari kegiatan invensi dan inovasi	Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi penelitian lainnya di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
					Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
					Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	
				Meningkatnya kaji terap	Persentase kaji terap yang berhasil dilaksanakan	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
					Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Perangkat Daerah			**Nilai SAKIP Perangkat daerah**		
					Persentase Inovasi yang diterapkan		
					tingkat kepuasan layanan kesekretariatan		
			Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		**persentase kegiatan tepat waktu**	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	
					persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan tepat Waktu		
					Nilai audit kearsipan Perangkat Daerah		

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti		
				Meningkatnya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD tepat waktu	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PD	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan PD	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Persentase administrasi keuangan PD tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya administrasi BMD	Persentase administrasi BMD PD berjalan sesuai standar	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
				Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pegawai PD yang terlayani	Administrasi Kepegawaian PD	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
				Meningkatnya tata kelola administrasi umum	Persentase administrasi umum PD berjalan sesuai standar	Administrasi Umum PD	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya pengadaan BMD	Persentase pengadaan BMD PD yang terpenuhi	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya penyediaan jasa umum	Persentase jasa penunjang urusan yang tersedia	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya BMD	Persentase BMD penunjang urusan yang terpelihara	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK/SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.1.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Dan Pendanaan Indikatif

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01 - PERENCANAAN				11.508.157.672		12.499.068.936		13.225.631.435		13.265.688.955		13.529.766.865		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.412.460.216		6.292.799.696		6.563.099.696		6.563.225.496		6.895.825.496		
Meningkatnya kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase kegiatan tepat waktu (%)	85	100	7.412.460.216	100	6.292.799.696	100	6.563.099.696	100	6.563.225.496	100	6.895.825.496	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase penyusunan perencanaan dan pelaporan tepat Waktu (%)	85	100		100		100		100		100			
	Nilai audit kearsipan perangkat daerah (Angka)	91,91	93		94		95		96		97			
	Persentase aduan/keluhan antar bidang terkait layanan sekretariat yang ditindak lanjuti (%)	85	100		100		100		100		100			
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				51.904.819		65.204.000		75.204.000		77.704.000		77.704.000		
Meningkatnya penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	51.904.819	2	65.204.000	2	75.204.000	2	77.704.000	2	77.704.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0		0		2		2		2			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0		12.704.000		12.704.000		12.704.000		12.704.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	0	2	12.704.000	2	12.704.000	2	12.704.000	2	12.704.000		
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				21.994.794		22.000.000		22.000.000		22.500.000		22.500.000		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	21.994.794	1	22.000.000	1	22.000.000	1	22.500.000	1	22.500.000		
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				8.044.650		8.000.000		8.000.000		8.500.000		8.500.000		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	2	8.044.650	2	8.000.000	2	8.000.000	2	8.500.000	2	8.500.000		
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				6.942.550		7.000.000		7.000.000		7.500.000		7.500.000		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	6.942.550	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.500.000	1	7.500.000		
5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				7.388.655		7.000.000		7.000.000		7.500.000		7.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	2	7.388.655	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.500.000	2	7.500.000		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				7.534.170		8.500.000		8.500.000		9.000.000		9.000.000		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	4	7.534.170	4	8.500.000	4	8.500.000	4	9.000.000	4	9.000.000		
5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	2	10.000.000		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.226.293.100		4.272.683.200		4.272.683.200		4.482.183.200		4.507.183.200		
Meningkatnya pelayanan administrasi keuangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	4	4.226.293.100	4	4.272.683.200	4	4.272.683.200	4	4.482.183.200	4	4.507.183.200		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	900		950		1.000		1.000		1.000			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	336	364		364		364		364		364			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				3.956.917.086		4.000.000.000		4.000.000.000		4.200.000.000		4.200.000.000		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	336	364	3.956.917.086	364	4.000.000.000	364	4.000.000.000	364	4.200.000.000	364	4.200.000.000		
5.01.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				205.320.000		204.000.000		204.000.000		204.000.000		204.000.000		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12	205.320.000	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000	12	204.000.000		
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				6.950.150		5.183.200		5.183.200		5.183.200		5.183.200		
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	12	900	6.950.150	950	5.183.200	1.000	5.183.200	1.000	5.183.200	1.000	5.183.200		
5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				0		0		0		0		25.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25.000.000		
5.01.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				12.910.450		20.500.000		20.500.000		20.500.000		20.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	1	12.910.450	1	20.500.000	1	20.500.000	1	20.500.000	1	20.500.000		
5.01.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				42.398.590		26.000.000		26.000.000		30.000.000		30.000.000		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	4	42.398.590	4	26.000.000	4	26.000.000	4	30.000.000	4	30.000.000		
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		15.000.000		15.000.000		20.000.000		20.000.000		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	0	0	12	15.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000		
5.01.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1.796.824		2.000.000		2.000.000		2.500.000		2.500.000		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi	1	1	1.796.824	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Anggaran (Dokumen)													
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				4.205.920		5.353.800		19.353.800		12.353.800		25.353.800		
Meningkatnya administrasi BMD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	4.205.920	0	5.353.800	0	19.353.800	1	12.353.800	0	25.353.800		
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0		0		0		0		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0		0		1		0		0			
5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		6.500.000		0		0		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	6.500.000	0	0	0	0		
5.01.01.2.03.0002 - Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		6.500.000		
Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6.500.000		
5.01.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				0		0		6.500.000		0		0		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	1	6.500.000	0	0	0	0		
5.01.01.2.03.0004 - Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		0		5.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000		
5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		0		0		5.000.000		0		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0		
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.205.920		5.353.800		6.353.800		7.353.800		8.353.800		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	4.205.920	12	5.353.800	12	6.353.800	12	7.353.800	12	8.353.800		
5.01.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				0		0		0		0		5.500.000		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5.500.000		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				117.188.740		279.665.496		362.665.496		329.665.496		361.665.496		
Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi	5	5	117.188.740	5	279.665.496	5	362.665.496	5	329.665.496	5	361.665.496		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Peraturan Perundang-Undangan (Orang)													
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0		0		1		0		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0		1		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25	25		25		25		25		25			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0		2		2		2		2			
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0		0		5		5		5			
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				5.818.020		7.729.996		8.729.996		9.729.996		10.729.996		
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1	1	5.818.020	1	7.729.996	1	8.729.996	1	9.729.996	1	10.729.996		
5.01.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0		130.500.000		135.500.000		140.500.000		145.500.000		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	0	0	2	130.500.000	2	135.500.000	2	140.500.000	2	145.500.000		
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12.480.000		13.160.000		14.160.000		15.160.000		16.160.000		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	24	24	12.480.000	24	13.160.000	24	14.160.000	24	15.160.000	24	16.160.000		
5.01.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0		20.000.000		0		20.000.000		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	20.000.000	0	0	1	20.000.000		
5.01.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				0		25.000.000		25.000.000		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	1	25.000.000	1	25.000.000	0	0	0	0		
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	0	0	0	0	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000		
5.01.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				46.390.720		48.275.500		51.275.500		54.275.500		57.275.500		
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	25	25	46.390.720	25	48.275.500	25	51.275.500	25	54.275.500	25	57.275.500		
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				52.500.000		55.000.000		58.000.000		60.000.000		62.000.000		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5	5	52.500.000	5	55.000.000	5	58.000.000	5	60.000.000	5	62.000.000		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				942.912.477		668.512.200		701.412.200		724.138.000		826.938.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya tata kelola administrasi umum	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	942.912.477	1	668.512.200	1	701.412.200	1	724.138.000	1	826.938.000		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	720	365		365		365		365		365			
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0		0		1		1		1			
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0		0		0		0		1			
5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				1.994.000		2.244.000		2.344.000		2.444.000		2.544.000		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	1.994.000	1	2.244.000	1	2.344.000	1	2.444.000	1	2.544.000		
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				480.822.162		200.260.000		205.260.000		210.260.000		215.260.000		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3	1	480.822.162	1	200.260.000	1	205.260.000	1	210.260.000	1	215.260.000		
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0		0		0		90.000.000		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				66.607.440		71.274.200		72.274.200		73.000.000		74.000.000		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	66.607.440	1	71.274.200	1	72.274.200	1	73.000.000	1	74.000.000		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				21.348.875		21.000.000		22.000.000		23.000.000		24.000.000		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	1	21.348.875	1	21.000.000	1	22.000.000	1	23.000.000	1	24.000.000		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.140.000		3.500.000		4.000.000		4.500.000		5.000.000		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	720	365	1.140.000	365	3.500.000	365	4.000.000	365	4.500.000	365	5.000.000		
5.01.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0		0		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		
5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu				71.000.000		49.600.000		49.900.000		50.300.000		50.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	12	12	71.000.000	12	49.600.000	12	49.900.000	12	50.300.000	12	50.500.000		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300.000.000		320.634.000		330.634.000		340.634.000		350.634.000		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	4	4	300.000.000	4	320.634.000	4	330.634.000	4	340.634.000	4	350.634.000		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				0		0		5.000.000		5.000.000		5.000.000		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		
5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				0		0		0		5.000.000		0		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	5.000.000	0	0		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1.022.811.000		125.000.000		150.000.000		50.000.000		50.000.000		
Meningkatnya pengadaan BMD	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1.022.811.000	3	125.000.000	0	150.000.000	0	50.000.000	0	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		1		0			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		2		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	7		0		0		0		0			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		0		1		0		0			
5.01.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0		0		50.000.000		0		0		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0		
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.022.811.000		0		0		0		0		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	7	1.022.811.000	0	0	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0		0		50.000.000		0		0		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0		
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				0		50.000.000		0		0		0		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	2	50.000.000	0	0	0	0	0	0		
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	0	50.000.000		
5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		75.000.000		0		0		0		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0	3	75.000.000	0	0	0	0	0	0		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				515.200.000		431.659.000		533.259.000		434.859.000		536.459.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya layanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	515.200.000	1	431.659.000	1	533.259.000	1	434.859.000	1	536.459.000		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0		0		1		0		1			
5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.300.000		1.613.000		1.713.000		1.813.000		1.913.000		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.300.000	1	1.613.000	1	1.713.000	1	1.813.000	1	1.913.000		
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				72.000.000		72.000.000		72.500.000		73.000.000		73.500.000		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	72.000.000	12	72.000.000	12	72.500.000	12	73.000.000	12	73.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0		0		100.000.000		0		100.000.000		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				441.900.000		358.046.000		359.046.000		360.046.000		361.046.000		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	441.900.000	12	358.046.000	12	359.046.000	12	360.046.000	12	361.046.000		
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				531.944.160		444.722.000		448.522.000		452.322.000		510.522.000		
Terpeliharanya BMD	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	531.944.160	0	444.722.000	0	448.522.000	0	452.322.000	5	510.522.000		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	22		22		22		22		22			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		0		0		0		2			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	30		30		30		30		30			
5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				87.285.200		68.814.000		69.814.000		70.814.000		71.814.000		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	87.285.200	1	68.814.000	1	69.814.000	1	70.814.000	1	71.814.000		
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				244.358.960		221.608.000		222.608.000		223.608.000		224.608.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	20	22	244.358.960	22	221.608.000	22	222.608.000	22	223.608.000	22	224.608.000		
5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0		0		0		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	25.000.000		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				25.500.000		36.600.000		37.600.000		38.600.000		39.600.000		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	30	25.500.000	30	36.600.000	30	37.600.000	30	38.600.000	30	39.600.000		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				156.800.000		99.000.000		99.500.000		100.000.000		105.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	156.800.000	1	99.000.000	1	99.500.000	1	100.000.000	1	105.000.000		
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				18.000.000		18.700.000		19.000.000		19.300.000		19.500.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	18.000.000	1	18.700.000	1	19.000.000	1	19.300.000	1	19.500.000		
5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0		0		0		25.000.000		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25.000.000		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.958.373.710		3.343.466.710		3.562.514.140		3.514.051.510		3.343.466.710		
Meningkatnya penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah	Persentase perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu (%)	100	100	1.958.373.710	100	3.343.466.710	100	3.562.514.140	100	3.514.051.510	100	3.343.466.710	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase perangkat daerah dengan MR berjalan baik (%)	0	10		25		40		60		80			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Persentase perangkat daerah dengan capaian IKU minimal sebesar 90% (%)	91,67	93		94		95		96		97			
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.646.101.370		2.388.600.970		2.607.648.400		2.559.185.770		2.388.600.970		
Meningkatnya pelaksanaan tahapan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	1.646.101.370	1	2.388.600.970	2	2.607.648.400	1	2.559.185.770	1	2.388.600.970		
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1		1		1		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) (Dokumen)	2	2		1		2		3		2			
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1.500	0		1.160		1.170		1.180		1.190			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0		1		1		1		1			
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				0		30.755.000		30.755.000		30.755.000		30.755.000		
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	0	1	0	1	30.755.000	1	30.755.000	1	30.755.000	1	30.755.000		
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				0		31.910.000		31.910.000		31.910.000		31.910.000		
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	1	1	0	1	31.910.000	1	31.910.000	1	31.910.000	1	31.910.000		
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				59.308.000		59.308.000		109.754.700		59.308.000		59.308.000		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	59.308.000	1	59.308.000	2	109.754.700	1	59.308.000	1	59.308.000		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah				0		122.160.300		122.160.300		160.460.300		122.160.300		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	0	0	1	122.160.300	1	122.160.300	1	160.460.300	1	122.160.300		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				216.146.500		216.146.500		216.146.500		348.431.300		216.146.500		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1	216.146.500	1	216.146.500	1	216.146.500	2	348.431.300	2	216.146.500		
5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				0		10.604.300		10.604.300		10.604.300		10.604.300		
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1.500	0	0	1.160	10.604.300	1.170	10.604.300	1.180	10.604.300	1.190	10.604.300		
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				1.370.646.870		1.917.716.870		2.086.317.600		1.917.716.870		1.917.716.870		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/ RKPD) (Dokumen)	2	2	1.370.646.870	1	1.917.716.870	2	2.086.317.600	3	1.917.716.870	2	1.917.716.870		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				136.336.100		194.631.600		194.631.600		194.631.600		194.631.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya analisis kebijakan perencanaan pembangunan	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0	0	136.336.100	10	194.631.600	10	194.631.600	10	194.631.600	10	194.631.600		
	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0	72		72		72		72		72			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				0		20.117.500		20.117.500		20.117.500		20.117.500		
Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	0	0	0	1	20.117.500	1	20.117.500	1	20.117.500	1	20.117.500		
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				136.336.100		136.336.100		136.336.100		136.336.100		136.336.100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	0	72	136.336.100	72	136.336.100	72	136.336.100	72	136.336.100	72	136.336.100		
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				0		38.178.000		38.178.000		38.178.000		38.178.000		
Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	0	0	0	10	38.178.000	10	38.178.000	10	38.178.000	10	38.178.000		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				175.936.240		252.595.140		252.595.140		252.595.140		252.595.140		
Meningkatnya penerapan manajemen risiko, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	32	32	175.936.240	32	252.595.140	32	252.595.140	32	252.595.140	32	252.595.140		
	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	18	2		2		2		3		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0	0		1		1		1		1			
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota				0		36.073.600		36.073.600		36.073.600		36.073.600		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0	0	0	1	36.073.600	1	36.073.600	1	36.073.600	1	36.073.600		
5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah				0		40.585.300		40.585.300		40.585.300		40.585.300		
Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	32	32	0	32	40.585.300	32	40.585.300	32	40.585.300	32	40.585.300		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah				175.936.240		175.936.240		175.936.240		175.936.240		175.936.240		
Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	18	2	175.936.240	2	175.936.240	2	175.936.240	3	175.936.240	2	175.936.240		
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0		507.639.000		507.639.000		507.639.000		507.639.000		
Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	0	0	1	507.639.000	1	507.639.000	1	507.639.000	1	507.639.000		
	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0		1		1		1		1			
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0		31.910.000		31.910.000		31.910.000		31.910.000		
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	0	0	0	1	31.910.000	1	31.910.000	1	31.910.000	1	31.910.000		
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				0		234.875.000		234.875.000		234.875.000		234.875.000		
Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	0	0	0	1	234.875.000	1	234.875.000	1	234.875.000	1	234.875.000		
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				0		240.854.000		240.854.000		240.854.000		240.854.000		
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	0	0	0	1	240.854.000	1	240.854.000	1	240.854.000	1	240.854.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)													
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				2.137.323.746		2.862.802.530		3.100.017.599		3.188.411.949		3.290.474.659		
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD (%)	100	100	2.137.323.746	100	2.862.802.530	100	3.100.017.599	100	3.188.411.949	100	3.290.474.659	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD (%)	100	100		100		100		100		100			
	Persentase keselarasan program nasional, provinsi dan daerah (%)	100	100		100		100		100		100			
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				635.932.976		762.504.400		944.894.306		862.476.327		832.628.609		
Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	635.932.976	1	762.504.400	1	944.894.306	11	862.476.327	1	832.628.609		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD	2	2		2		2		2		2			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	dan RKPD) (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				30.824.145		46.357.750		55.500.000		60.500.000		73.205.000		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	30.824.145	2	46.357.750	2	55.500.000	2	60.500.000	2	73.205.000		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0		29.823.350		40.896.463		50.363.700		55.804.720		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	0	1	29.823.350	1	40.896.463	11	50.363.700	1	55.804.720		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				0		25.962.150		35.346.582		40.696.240		46.265.864		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	0	1	25.962.150	1	35.346.582	1	40.696.240	1	46.265.864		
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				96.632.650		147.076.750		170.500.000		190.550.000		73.205.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	1	1	96.632.650	1	147.076.750	1	170.500.000	1	190.550.000	1	73.205.000		
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				75.435.274		150.211.900		175.000.000		19.550.000		33.205.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	75.435.274	2	150.211.900	2	175.000.000	2	19.550.000	2	33.205.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0		29.681.550		30.472.032		39.919.235		49.611.158		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	0	1	29.681.550	1	30.472.032	1	39.919.235	1	49.611.158		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				0		25.244.550		60.500.000		66.550.000		66.550.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	1	1	0	1	25.244.550	1	60.500.000	1	66.550.000	1	66.550.000		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				433.040.907		308.146.400		376.679.229		394.347.152		434.781.867		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD	1	1	433.040.907	1	308.146.400	1	376.679.229	1	394.347.152	1	434.781.867		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)													
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				317.455.900		1.042.667.100		1.087.972.032		1.209.569.235		1.255.571.158		
Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang perkonomian dan SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	317.455.900	2	1.042.667.100	2	1.087.972.032	2	1.209.569.235	2	1.255.571.158		
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				28.851.600		35.000.000		35.500.000		36.550.000		39.205.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	28.851.600	2	35.000.000	2	35.500.000	2	36.550.000	2	39.205.000		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0		8.621.200		24.472.032		36.919.235		39.611.158		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	0	1	8.621.200	1	24.472.032	1	36.919.235	1	39.611.158		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				0		7.045.900		10.500.000		6.550.000		26.550.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	0	1	7.045.900	1	10.500.000	1	6.550.000	1	26.550.000		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				288.604.300		580.000.000		590.000.000		690.000.000		700.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	1	1	288.604.300	1	580.000.000	1	590.000.000	1	690.000.000	1	700.000.000		
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0		33.000.000		35.500.000		36.550.000		39.205.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	0	2	33.000.000	2	35.500.000	2	36.550.000	2	39.205.000		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0		23.000.000		25.000.000		30.000.000		32.000.000		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4	0	4	23.000.000	4	25.000.000	4	30.000.000	4	32.000.000		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				0		26.000.000		27.000.000		28.000.000		29.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	4	4	0	4	26.000.000	4	27.000.000	4	28.000.000	4	29.000.000		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				0		330.000.000		340.000.000		345.000.000		350.000.000		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	1	1	0	1	330.000.000	1	340.000.000	1	345.000.000	1	350.000.000		
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1.183.934.870		1.057.631.030		1.067.151.261		1.116.366.387		1.202.274.892		
Meningkatnya keselarasan perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang bidang infrastruktur dan kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	1.183.934.870	1	1.057.631.030		1.067.151.261	1	1.116.366.387	1	1.202.274.892		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				34.816.000		34.000.000		35.000.000		36.000.000		37.000.000		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	34.816.000	2	34.000.000	2	35.000.000	2	36.000.000	2	37.000.000		
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				0		9.463.000		14.472.032		16.919.235		19.611.158		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang	1	1	0	1	9.463.000	1	14.472.032	1	16.919.235	1	19.611.158		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Infrastruktur (Laporan)													
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				0		6.543.000		6.500.000		8.550.000		10.550.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	0	1	6.543.000	1	6.500.000	1	8.550.000	1	10.550.000		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				1.149.118.870		479.082.030		476.679.229		494.347.152		534.781.867		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	1	1	1.149.118.870	1	479.082.030	1	476.679.229	1	494.347.152	1	534.781.867		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				0		35.000.000		36.000.000		37.000.000		38.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	0	2	35.000.000	2	36.000.000	2	37.000.000	2	38.000.000		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0		12.000.000		13.000.000		15.000.000		17.000.000		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	0	1	12.000.000	1	13.000.000	1	15.000.000	1	17.000.000		
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				0		6.543.000		6.500.000		8.550.000		10.550.000		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	0	1	6.543.000	1	6.500.000	1	8.550.000	1	10.550.000		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				0		475.000.000		479.000.000		500.000.000		534.781.867		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	1	1	0	1	475.000.000		479.000.000	1	500.000.000	1	534.781.867		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				491.168.840		2.504.358.143		2.613.559.151		2.588.858.795		2.336.202.085		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				380.348.580		2.277.358.143		1.871.559.151		1.615.858.795		1.663.202.085		
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan (%)	100	100	380.348.580	100	2.277.358.143	100	1.871.559.151	100	1.615.858.795	100	1.663.202.085	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	Persentase HAKI yang difasilitasi (%)	48	50		60		65		65		75			
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				230.940.950		659.450.590		150.000.000		200.000.000		200.000.000		
Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang pemerintahan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	0	0	230.940.950	0	659.450.590	0	150.000.000	1	200.000.000	0	200.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang	0	0		0		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Ketatalaksanaan Desa (Laporan)													
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	0	1		1		0		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0	0		1		0		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	0	0		0		1		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	0		0		0		0		1			
5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah				0		0		0		0		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000		
5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				0		50.000.000		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0		
5.05.02.2.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan				0		0		50.000.000		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Laporan)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0		
5.05.02.2.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi				0		0		0		50.000.000		0		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.02.2.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				230.940.950		284.450.590		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	0	1	230.940.950	1	284.450.590	0	0	0	0	0	0		
5.05.02.2.01.0006 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat				0		50.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat (Laporan)	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0		
5.05.02.2.01.0007 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa				0		0		50.000.000		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksannya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa (Laporan)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0		
5.05.02.2.01.0008 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa				0		0		0		50.000.000		0		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0		
5.05.02.2.01.0009 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa				0		0		0		0		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000		
5.05.02.2.01.0010 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa				0		0		50.000.000		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa (Laporan)	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0		
5.05.02.2.01.0011 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa				0		275.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa (Laporan)	0	0	0	1	275.000.000	0	0	0	0	0	0		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				0		0		0		50.000.000		0		
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0		
5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan				0		0		0		0		50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan (Rekomendasi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000		
5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan				0		0		0		50.000.000		0		
Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0		
5.05.02.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang				0		0		0		0		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				0		350.000.000		767.455.870		400.000.000		500.000.000		
Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	0	0	0	0	350.000.000	1	767.455.870	0	400.000.000	0	500.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial				0		0		0		100.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0		
5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				0		0		0		0		100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		
5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan				0		0		350.000.000		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	350.000.000	0	0	0	0		
5.05.02.2.02.0004 - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga				0		0		0		150.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0		
5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata				0		350.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	0	0	0	1	350.000.000	0	0	0	0	0	0		
5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan				0		0		267.455.870		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	267.455.870	0	0	0	0		
5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				0		0		0		0		150.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000		
5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil				0		0		150.000.000		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0		
5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja				0		0		0		150.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				0		0		0		0		150.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000		
5.05.02.2.02.0011 - Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi				0		0		0		0		100.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				0		1.025.000.000		550.000.000		600.000.000		650.000.000		
Meningkatnya kualitas penelitian dan kajian bidang ekonomi dan pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	0	0	0	0	1.025.000.000	0	550.000.000	0	600.000.000	1	650.000.000		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	0		1		0		0		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	0	0		0		0				1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	1	0		1		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				0		0		350.000.000		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	350.000.000	0	0	0	0		
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				0		0		0		100.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				0		0		0		0		100.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				0		325.000.000		0		0		350.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	0	0	0	1	325.000.000	0	0	0	0	1	350.000.000		
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				0		0		0		300.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0		
5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				0		600.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya	1	0	0	1	600.000.000	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Mineral (Dokumen)													
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				0		0		100.000.000		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0		
5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				0		0		0		100.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0		
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				0		0		0		0		100.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		
5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				0		100.000.000		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				0		0		100.000.000		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0		
5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				0		0		0		100.000.000		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000.000	0	0		
5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				0		0		0		0		100.000.000		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0		0	1	100.000.000		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				149.407.630		242.907.553		404.103.281		415.858.795		313.202.085		
Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang HAKI	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1	149.407.630	1	242.907.553	1	404.103.281	1	415.858.795	1	313.202.085		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	1		0		0		0		1			
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				0		0		150.000.000		0		0		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi				0		0		0		150.000.000		0		
Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0		
5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif				93.290.100		192.907.553		204.103.281		215.858.795		228.202.085		
Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif (Laporan)	1	1	93.290.100	1	192.907.553	1	204.103.281	1	215.858.795	1	228.202.085		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				26.972.700		0		0		0		35.000.000		
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	0	1	26.972.700	0	0	0	0	0	0	1	35.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				29.144.830		50.000.000		50.000.000		50.000.000		50.000.000		
Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	1	1	29.144.830	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				110.820.260		227.000.000		742.000.000		973.000.000		673.000.000		
Meningkatnya pertumbuhan inovasi daerah	Persentase pertumbuhan inovasi (%)	4,8	10	110.820.260	11	227.000.000	12	742.000.000	15	973.000.000	20	673.000.000	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan				0		100.000.000		250.000.000		250.000.000		100.000.000		
Meningkatnya kaji terap	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	0	0		100.000.000	0	250.000.000	1	250.000.000	0	100.000.000		
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan	0	0		0		1		0		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)													
	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0		1		0		0		0			
	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0		0		0		1		0			
5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				0		100.000.000		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0		
5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset				0		0		100.000.000		0		0		
Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0		
5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				0		0		0		150.000.000		0		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0		
5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				0		0		0		0		100.000.000		
Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.03.2.01.0005 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan				0		0		150.000.000		0		0		
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Pelatihan)	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0		
5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				0		0		0		100.000.000		0		
Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Dokumen)	0	0	0		0	0	0	1	100.000.000	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi				110.820.260		127.000.000		492.000.000		723.000.000		573.000.000		
Meningkatnya inovasi baru dari hasil riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	0	0	110.820.260	0	127.000.000	0	492.000.000	1	723.000.000	0	573.000.000		
	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	0		0		1		0		0			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	0	0				1		0		0			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan	0	0		0		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)													
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	0		0		0		0		1			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	0		0		0		1		0			
	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	0		0		0		1		0			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah)	0	0		0		0		0		1			
	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	0		0		0		0		1			
	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	0	0		0		1		0		0			
5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah				0		0		90.000.000		0		0		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	1	90.000.000	0	0	0	0		
5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi				0		0		0		75.000.000		0		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	75.000.000	0	0		
5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah				0		0		0		0		80.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	80.000.000		
5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah				0		0		0		75.000.000		0		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	75.000.000	0	0		
5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual				0		0		75.000.000		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI) (Laporan)	0	0	0		0	1	75.000.000	0	0	0	0		
5.05.03.2.02.0007 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi				0		0		0		75.000.000		0		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	75.000.000	0	0		
5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi				0		0		0		0		100.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator) (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi				0		0		0		75.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
penelitian lainnya di daerah														
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	0	0	0	0	0	0	0	1	75.000.000	0	0		
5.05.03.2.02.0010 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat				0		0		0		0		65.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	65.000.000		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.				0		0		0		95.000.000		0		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi. (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	95.000.000	0	0		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				110.820.260		127.000.000		127.000.000		128.000.000		128.000.000		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	0	1	110.820.260	1	127.000.000	1	127.000.000	1	128.000.000	1	128.000.000		
5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah				0		0		100.000.000		0		0		
Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah (Sistem Informasi)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.03.2.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah				0		0		0		100.000.000		0		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0		
5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				0		0		0		0		100.000.000		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		
5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi				0		0		100.000.000		0		0		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi (Laporan)	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0		
5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi				0		0		0		100.000.000		0		
Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi (Pelatihan)	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
5.05.03.2.02.0019 - Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi				0		0		0		0		100.000.000		
Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi (Naskah)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000		

Tabel 4.1.3
Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah				
1.	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian rencana pembangunan daerah	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
			5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
			5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
			5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
			5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
			5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
2.	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan daerah dan perencanaan antar jenjang	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
			5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
			5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
			5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
			5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
			5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
			5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
			5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
3.	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0001 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	
			5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
			5.05.02.2.01.0003 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
			5.05.02.2.01.0004 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	
			5.05.02.2.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
			5.05.02.2.01.0006 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	
			5.05.02.2.01.0007 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	
			5.05.02.2.01.0008 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	
			5.05.02.2.01.0009 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	
			5.05.02.2.01.0010 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	
			5.05.02.2.01.0011 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	
			5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.05.02.2.01.0013 - Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	
			5.05.02.2.01.0014 - Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	
			5.05.02.2.01.0015 - Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	
			5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
			5.05.02.2.02.0002 - Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
			5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
			5.05.02.2.02.0004 - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
			5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
			5.05.02.2.02.0006 - Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	
			5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
			5.05.02.2.02.0008 - Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
			5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	
			5.05.02.2.02.0011 - Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	
			5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
			5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
			5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
			5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
			5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
			5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
			5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
			5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
			5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
			5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
			5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
			5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
			5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
			5.05.02.2.04.0002 - Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	
			5.05.02.2.04.0003 - Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
			5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
4.	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Meningkatnya pertumbuhan inovasi daerah	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			5.05.03.2.01.0001 - Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
			5.05.03.2.01.0003 - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0005 - Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
			5.05.03.2.01.0006 - Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0001 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	
			5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
			5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
			5.05.03.2.02.0004 - Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	
			5.05.03.2.02.0006 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	
			5.05.03.2.02.0007 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	
			5.05.03.2.02.0008 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
			5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
			5.05.03.2.02.0010 - Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	
			5.05.03.2.02.0011 - Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	
			5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
			5.05.03.2.02.0013 - Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	
			5.05.03.2.02.0014 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	
			5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	
			5.05.03.2.02.0017 - Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	
			5.05.03.2.02.0018 - Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	
			5.05.03.2.02.0019 - Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Pengukuran kinerja membutuhkan indikator kinerja yang terukur dan jelas. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact).

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan perangkat daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan bidang urusan pada akhir periode perencanaan.

Pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama, namun tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi bupati dan wakil bupati beserta turunannya. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang.

Pada bab ini disajikan kinerja penyelenggaran pemerintahan bidang urusan perangkat daerah yang diindikasikan oleh indikator kinerja dengan target capaian selama 6 (enam) tahun yang akan datang. Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan bidang urusan pencapaian tujuan dan sasaran serta program perangkat daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang urusan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode perencanaan. Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang merupakan indikator kinerja tujuan dan/atau sasaran serta program renstra. Sementara indikator kinerja daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah disebut dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja perangkat daerah memuat komitmen perangkat daerah pada tingkat kinerja hasil (outcome). Kinerja hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama perangkat daerah tahun 2025- 2030 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*
1.	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									
2.	Persentase Capaian Target Kinerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	%	97,82	98	98,5	99	99,5	100	100	
3.	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	41,7	48	56	66	78	92	100	
4.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Indeks	83,95	84,5	85,1	85,75	86,25	86,75	87	
5.	Rata-rata tingkat kematangan Inovasi daerah	Angka	59	60	65	70	75	80	90	
6.	Persentase capaian IKU RKPD	Angka	93,03	94	94,5	95	95,5	96	96,5	
7.	Indeks Perencanaan	Angka	96,75	97	98	99	99,5	100	100	
8.	Nilai Komponen Perencanaan SAKIP	Angka	22,64	22,9	24,5	26	28	30	30	
9.	Indeks Inovasi Perangkat Daerah	Indeks	0	45	50	55	60	65	70	
10.	Persentase perangkat daerah yang berkinerja tinggi	%	88,74%	89,24	89,74	90,24	90,75	91,24	91,74	
11.	Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan	Indeks	0	75	76	77,5	80	82,5	85	

Penetapan indikator kinerja kunci (IKK) perangkat daerah tahun 2025-2030 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4.2.2.
Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
1.	5.01 - PERENCANAAN										
2.	Persentase Keselarasan RKPD dengan RPJMD	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase perencanaan daerah yang tersusun tepat waktu	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
4.	Persentase usulan masyarakat dan pokir yang selaras dengan isu dan prioritas pembangunan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
5.	Persentase keselarasan Renja PD dengan RKPD	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
6.	Persentase perangkat daerah dengan capaian IKU minimal sebesar 90%	positif	%	91,67	92,67	93,67	94,67	95,67	96,67	97,67	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
7.	Persentase perangkat daerah dengan MR berjalan baik	positif	%	0	0	10	25	40	60	80	
8.	Persentase keselarasan program nasional, provinsi dan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
9.	Persentase program nasional dan provinsi yang terakomodir dalam Renja PD	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase program pembangunan daerah yang berkinerja tinggi	positif	%	85,81	87,31	88,81	90,31	91,81	93,31	94,81	
11.	Persentase rata-rata kinerja capaian target RKPD	positif	%	93	95	97	98	99	99	99	
12.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang Telah Ditetapkan dengan PERKADA	positif	*	2	2	2	2	2	2	2	
13.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJMD yang Telah Ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	positif	*	1	1	1	1	1	1	1	
14.	Tersedianya Dokumen Perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	positif	*	1	1	1	1	1	1	1	
15.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
16.	Persentase kelengkapan kertas kerja rumusan kebijakan perencanaan yang dihasilkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
17.	Persentase keselarasan program, kegiatan dan indikator kinerja antar dokumen (RPJMD, Rentra, RKPD, Renja PD)	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
18.	Persentase ketepatan waktu pengisian data dan informasi perencanaan dalam SIPD	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
19.	Persentase ketersediaan data dan informasi	positif	%	89	90	91	92	93	94	95	
20.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan tahapan penyusunan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
21.	Persentase PD yang menyusun MR	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
22.	Persentase pelaksanaan tahapan penyusunan sesuai waktunya	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
23.	5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
24.	Persentase pertumbuhan inovasi	positif	%	0	0	10	11	12	15	20	
25.	Persentase hasil kelitbangan yang termanfaatkan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
26.	Persentase HAKI yang difasilitasi	positif	%	48	50	50	60	65	65	75	
27.	Persentase kaji terap yang berhasil dilaksanakan	positif	%	0	0	5	5	10	10	10	
28.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	positif	%	0	25	30	35	40	50	50	
29.	Persentase penelitian / kajian yang sesuai dengan isu strategis daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
30.	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
31.	Persentase implementasi rencana kelitbangan	positif	%	33,33	100	100	100	100	100	100	
32.	Persentase pertumbuhan usulan HAKI	positif	%	5	5	5	5	10	10	20	
33.	Persentase produk baru yang dihasilkan dari kegiatan invensi dan inovasi	positif	%	0	0	5	5	5	10	10	
34.	Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Tahun 2025–2029 ini merupakan penjabaran dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan serta pembangunan daerah selama lima tahun ke depan.

Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan serta sub kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah serta pencapaian penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Perangkat Daerah berkewajiban menjadikan dokumen Renstra ini sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) serta dalam rangka mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun.

5.1 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan bertujuan untuk menciptakan koordinasi dan keberlanjutan pelaksanaan peraturan dan program-program pembangunan daerah. Dengan demikian akan terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam kinerja maupun penganggaran serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Relevan dengan itu, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban menyebarluaskan substansi dokumen Renstra PD kepada seluruh unit kerja internalnya dan pemangku kepentingan.
2. Renstra PD ini dijabarkan ke dalam Renja PD setiap tahun dan menjadi pedoman dalam penyusunan RKA-PD.
3. Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa seluruh kegiatan yang dirancang selaras dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dalam dokumen RPJMD.
4. Perangkat Daerah akan melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi Renstra secara responsif gender.
5. Renstra PD menjadi acuan dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, pengendalian, evaluasi, serta pelaporan akuntabilitas kinerja secara periodik.
6. Dalam hal terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) selama periode Renstra ini, maka penyesuaian terhadap dokumen Renstra PD dapat dilakukan sesuai ketentuan.
7. Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan manajemen risiko strategis dan operasional berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMD dan Renstra PD.
8. Renstra PD ini menjadi dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan mendukung penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah.

9. Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Renja PD dan capaian Renstra PD secara berkala, serta melaporkannya kepada Bupati secara langsung dan atau melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah.

5.2. Pedoman Transisi

Pedoman transisi merupakan pedoman penyelenggaraan urusan pemerintah daerah setelah berakhirnya Renstra PD Tahun 2025-2029. Pedoman transisi ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada Perangkat Daerah dalam menyusun dokumen rencana pembangunan pada periode berikutnya sehingga tidak terjadi kekosongan pengaturan rencana pembangunan.

Guna menjaga kesinambungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah oleh Perangkat Daerah pada saat transisi maka:

1. Renja PD Tahun 2025 merupakan bagian dari Renstra PD Tahun 2025-2029.
2. Renstra PD Tahun 2025-2029 dan RKPD Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2030 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD Tahun 2030 selama belum selesainya penyusunan Renstra PD Tahun 2030 - 2035.
3. Rencana kerja dan program tahun terakhir pelaksanaan Renstra PD harus dirancang dengan mempertimbangkan keberlanjutan program strategis, meskipun terdapat perubahan kepemimpinan daerah.
4. Perangkat Daerah tetap dapat menyusun program dan kegiatan berdasarkan Renstra PD ini hingga adanya penyesuaian terhadap RPJMD yang baru.
5. Perangkat Daerah wajib menjaga kesinambungan pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas dalam masa transisi pemerintahan, dengan tetap mengacu pada arah pembangunan jangka panjang dan tahunan daerah .
6. Dalam masa transisi, diperlukan koordinasi intensif dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintah daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan penyelarasan arah kebijakan tahunan dengan dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang masih berlaku.
7. Perangkat Daerah tetap diberi ruang untuk melakukan penyempurnaan terhadap Renja PD dan usulan kegiatan sesuai dinamika kebutuhan serta masukan dari kepala daerah terpilih.

   Dengan demikian, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan strategis bagi seluruh jajaran di lingkungan Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan, baik pada masa normal maupun masa transisi pemerintahan.

Barabai, 19 September 2025
Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,

MUHIDDIN, SP
Pembina Utama Muda
NIP. 19680504 199703 1 008